



# KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH SYARIAH

INSIGHT ▪ EDISI KE-18 ▪ JANUARI 2026



INSIGHT • EDISI KE-18 • JANUARI 2026

# KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH SYARIAH



Dewan Direksi

**Penanggung Jawab:** KH Sholahudin Al Aiyub, M.Si.

**Dewan Redaksi:** Sutan Emir Hidayat.

**Redaktur Pelaksana:** Inza Putra. **Kontributor:**

Ishmah Qurratu'ain, Bagus Aryo, dan Iwan Rudi

Saktiawan. **Desain dan Layout:** Lidya Dewi

Nurjanah.

---

# Daftar isi

## 01 KATA PENGANTAR

KH Sholahudin Al Aiyub, M.Si. - Direktur Eksekutif KNEKS

## 03 FOKUS UTAMA

KDKMP Syariah sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

## 08 WAWANCARA PERAN PEMERINTAH

Destry Anna Sari - Deputi Bidang Pengembangan Talenta & Daya Saing Koperasi, Kemenkop

## 16 WAWANCARA PERAN KNEKS

Bagus Aryo, PhD - Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah KNEKS

## 30 WAWANCARA EVALUASI AKADEMISI

Prof. Dr. Ida Hindarsyah, S.Sos., MM., M.Si – Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Pasundan

## 40 WAWANCARA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI KDKMP

Alwin Fajrie Siregar, SE - KDKMP Giri Mukti, Lebak, Banten

## 44 WAWANCARA IMPLEMENTASI PILOTING

Amaluddin M.,ST - BMT Amanah Sultra Kendari

## 54 AKADEMIA KELEMBAGAAN KDKMP SYARIAH

Hafieda Rasyifa - Digital Funding Amil Corporate BSI Maslahat

# Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut hadirnya edisi *Insight KDKMP Syariah* ini sebagai sebuah ikhtiar strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat desa dan kelurahan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengetahuan, sumber inspirasi, serta sarana edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, menunjukkan komitmen kuat dalam mengerakkan kembali koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan respons atas kebutuhan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui pendekatan ekonomi berbasis gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 83.762 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, sejalan dengan jumlah 83.120 desa dan kelurahan yang telah berbadan hukum. Angka ini mencerminkan potensi besar koperasi sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia dalam *retreat* kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025, yang menekankan pentingnya pembentukan koperasi desa sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pada Rapat Terbatas di Istana Negara tanggal 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang secara resmi akan dilaunching bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.



Dalam kerangka tersebut, KDKMP Syariah memiliki peran yang sangat strategis. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, tata kelola yang amanah, serta prinsip keberlanjutan, KDKMP Syariah menghadirkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang selaras dengan prinsip syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memandang bahwa penguatan KDKMP Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan akses pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga sebagai platform pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial syariah, serta pengembangan ekosistem ekonomi halal di tingkat lokal.

Melalui *Insight* ini, kami berharap para pengelola KDKMP, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, tata kelola, peluang kolaborasi, serta praktik terbaik dalam pengembangan KDKMP Syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci agar KDKMP Syariah mampu tumbuh sebagai lembaga yang profesional, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini, serta kepada para mitra yang senantiasa mendukung upaya perluasan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Semoga *Insight* KDKMP Syariah ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita untuk bangsa dan negara.

Direktur Eksekutif KNEKS  
**KH Sholahudin Al Aiyub, M.Si.**



## KDKMP Syariah sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi syariah yang kokoh untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus: inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan dana sosial syariah. Target inklusi keuangan nasional ditetapkan mencapai 90% pada tahun 2025. Saat ini, UMKM telah menyumbang sekitar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung ekonomi nasional. Di sisi lain, potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi baru sekitar 3%, menunjukkan ruang besar untuk optimalisasi.

Dalam konteks ini, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sangat penting. Indonesia memiliki sekitar 84.291 desa/kelurahan (BPS, 2025), namun akses ke lembaga keuangan formal masih rendah di wilayah terpencil. Dari 131.617 ribu koperasi nasional, sekitar 3.964 yang berbasis syariah (Kemenkop, 2024). KDKMP Syariah hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan layanan keuangan halal yang mudah diakses, berbasis komunitas, dan selaras dengan budaya lokal.

Jika dilihat kebelakang gerakan koperasi Indonesia punya sejarah panjang sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Embrio koperasi ditelusuri hingga akhir abad ke-19 ketika Patih Raden Aria Wirjaatmadja di Purwokerto membentuk lembaga kredit untuk melindungi rakyat dari praktik lintah darat; gagasan itu lalu berkembang menjadi bentuk awal koperasi simpan pinjam. Tonggak utamanya terjadi pada 12 Juli 1947 lewat Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya, yang menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional dan membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi sekaligus sosial yang berakar pada nilai gotong royong. Peran Mohammad Hatta sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" memperkuat landasan ideologis koperasi sebagai penjawantahan Pasal 33 UUD 1945: ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Narasi historis ini bukan sekadar romantika, ia adalah kompas normatif bagi penguatan koperasi di desa hari ini.



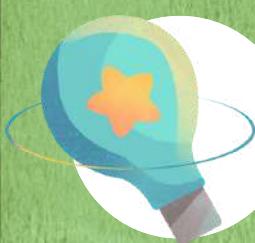
Di tingkat praktik, banyak koperasi Indonesia menunjukkan ketangguhan, inovasi, dan dampak sosial yang dapat menjadi rujukan bagi KDKMP Syariah. Kospin Jasa (Pekalongan) misalnya, bertransformasi dari koperasi permodalan pembatik pada 1973 menjadi koperasi simpan pinjam beraset triliunan rupiah melalui inovasi digital (ATM berlisensi, aplikasi mobile, QRIS), diversifikasi produk simpanan, dan tata kelola profesional membuktikan koperasi mampu sejajar dengan layanan perbankan modern. Pembelajaran kunci: digitalisasi layanan, fokus pada kebutuhan anggota, dan penguatan SDM.

Di ekosistem kredit berbasis komunitas, Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas dari NTT menonjol dalam pemberdayaan UMKM dan komunitas, hingga meraih pengakuan nasional atas dampak sosial dan strategi digitalisasi sebagai "peta jalan moderasi koperasi". Praktik baiknya meliputi pendalaman literasi keuangan anggota, diversifikasi unit usaha, dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan, yang relevan bagi desa dengan geografis menantang.

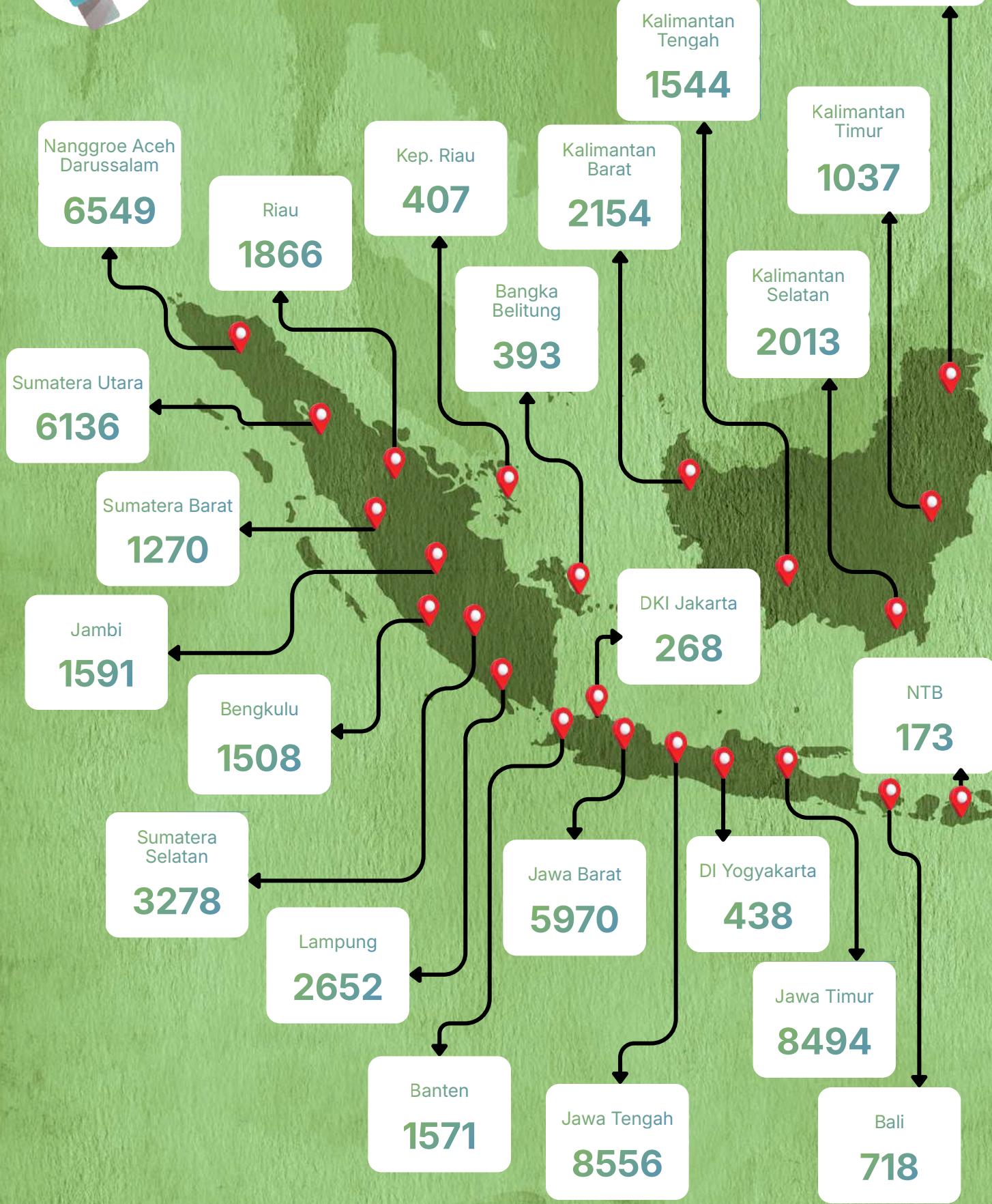
Dari ranah syariah, ada KSPPS BMT UGT Sidogiri dan Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) yang konsisten memadukan pembiayaan mikro syariah dengan penguatan ZISWAF, tata kelola profesional, serta pendampingan usaha anggota. Keduanya berulang kali masuk daftar koperasi besar Indonesia, menegaskan bahwa model koperasi syariah yang mengintegrasikan dana sosial, literasi keuangan, dan layanan produktif seraya bertumpu pada komunitas dapat tumbuh pesat dan berdampak nyata di akar rumput.

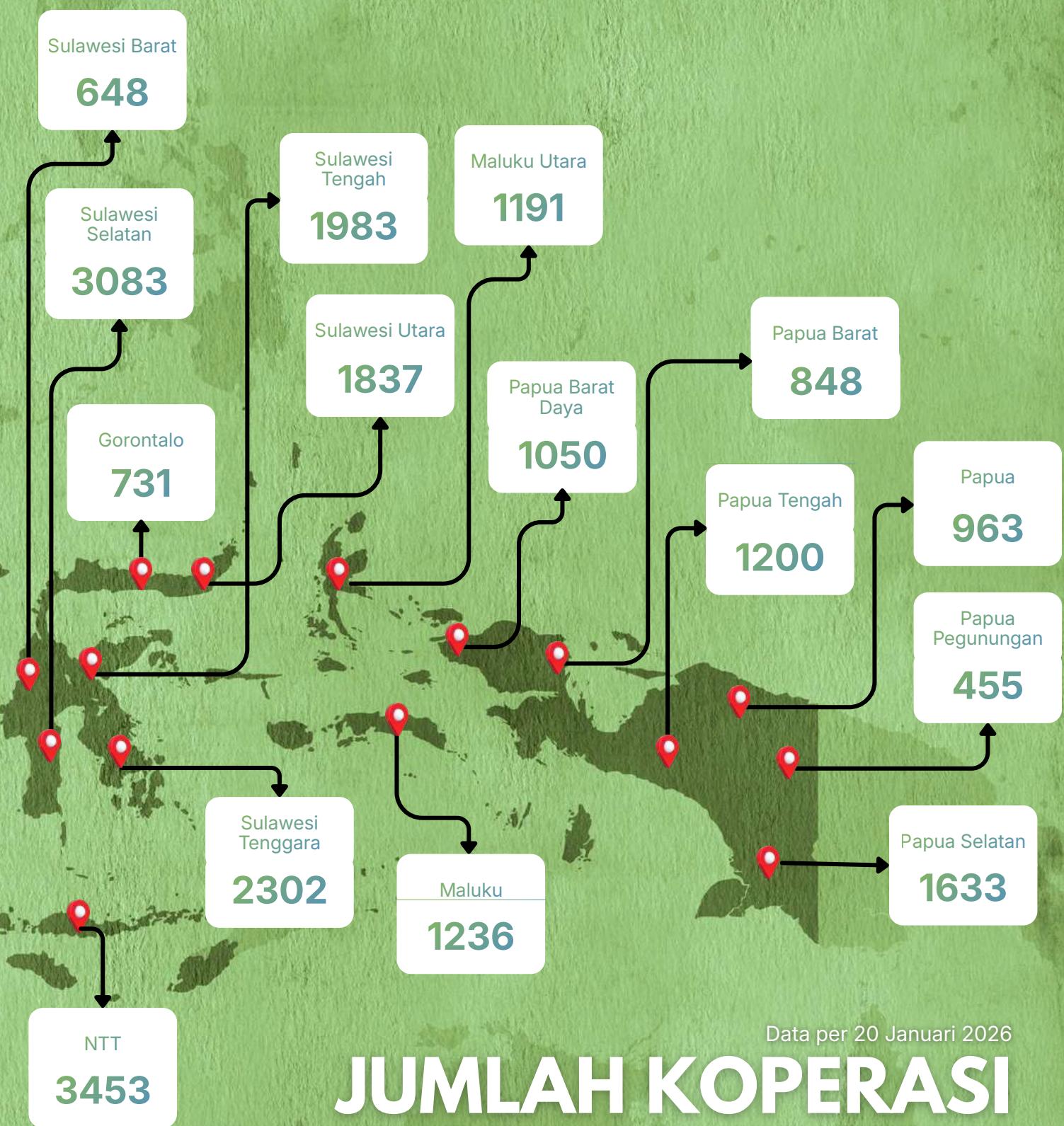
Koperasi yang diinisiasi oleh *founding father* secara prinsip sangat berkesesuaian dengan ketentuan syariah, bagaimana koperasi bisa digerakan untuk kesejahteraan bersama dan mengecilkan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu peran utama KDKMP Syariah adalah memotong rantai pasok perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya tidak sebatas menyediakan pembiayaan syariah dan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi desa. Melalui pendampingan, *offtaker*, pembiayaan produktif, pengembangan literasi keuangan syariah di ribuan desa, serta integrasi dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, koperasi ini mampu memberdayakan kelompok miskin dan rentan. Dampaknya jelas: UMKM desa naik kelas, kontribusi PDB meningkat, penanggulangan kemiskinan berjalan lebih cepat, dan ekosistem halal lokal menguat. Potensi pasar halal Indonesia sendiri diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun per tahun, sebuah peluang besar yang bisa digarap melalui sinergi koperasi syariah.

Peluang untuk memperkuat peran KDKMP Syariah sangat besar. Dukungan pemerintah dan KNEKS, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan fintech, serta optimalisasi dana sosial syariah dapat mempercepat pertumbuhan koperasi syariah di desa. Jika dikelola secara profesional dan didukung oleh sinergi multisektor, KDKMP Syariah berpotensi menjadi motor utama penguatan ekonomi umat sekaligus kontributor signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.



# INSIGHTFUL

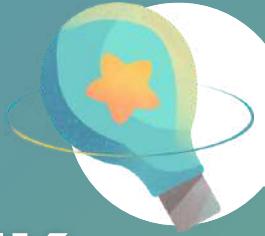




Data per 20 Januari 2026

# JUMLAH KOPERASI DI INDONESIA

Level: PROVINSI

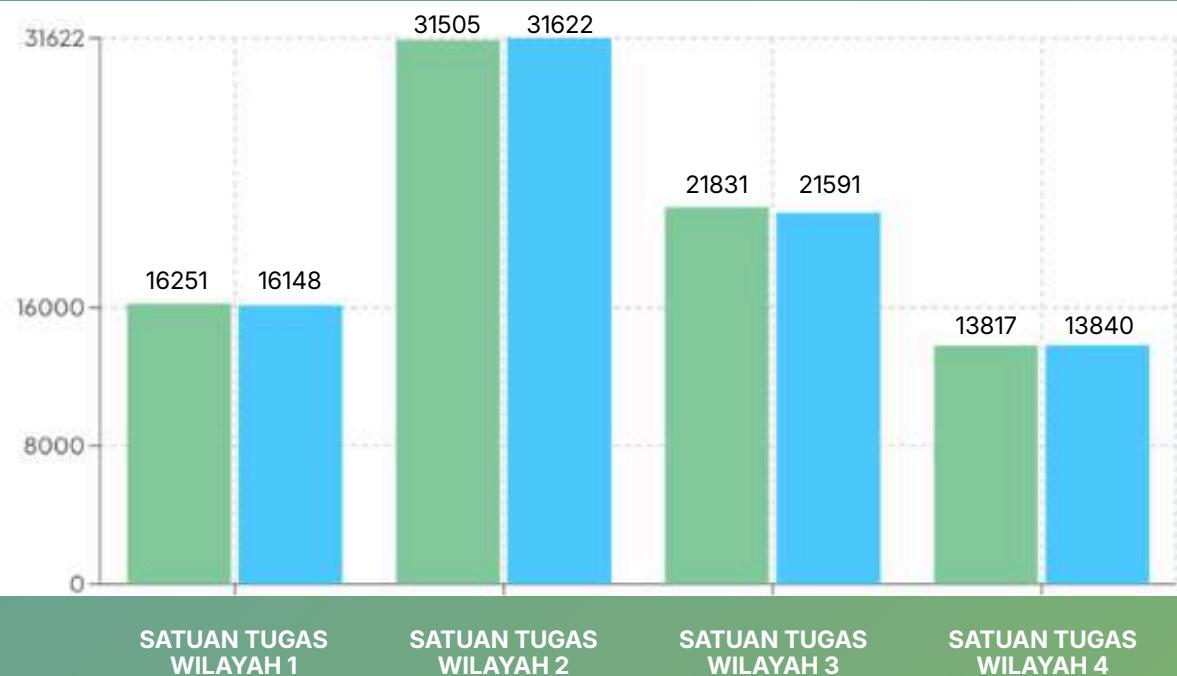


INSIGHTFUL

Data per 20 Januari 2026

# DATA STATISTIK KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH BERBADAN HUKUM

Berdasarkan Wilayah Satuan Tugas Nasional



 Total Desa/ Kelurahan Terbentuk Melalui Musyawarah Desa Khusus  
 Total Koperasi

# PERAN PEMERINTAH



## Apa Tujuan Utama Pengembangan KDKMP Syariah Dalam Kebijakan Kemenkop UKM?

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menegaskan bahwa sejak awal peluncurannya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang sebagai satu model koperasi nasional tanpa perbedaan antara skema syariah dan konvensional. Fokus utama KDKMP adalah penguatan sektor riil dan pengembangan usaha anggota.

Meski demikian, kebijakan KDKMP tetap adaptif terhadap karakteristik daerah. Di Aceh, KDKMP diperkenankan menggunakan pembiayaan syariah secara penuh karena sistem perbankan yang berlaku bersifat syariah dan tidak didukung oleh Himbara konvensional. **"Aceh memiliki kekhususan. Karena hanya menggunakan bank syariah, maka pembiayaan syariah diizinkan. Namun secara konsep, KDKMP tetap satu entitas,"** jelasnya.

Dalam implementasinya, Kemenkop UKM membagi pelaksanaan KDKMP ke dalam 12 sektor pembagian wilayah kerja untuk mempercepat pelaksanaan program secara masif dan menyeluruh.

*Destry Anna Sari*

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
TALENTA & DAYA SAING KOPERASI,  
KEMENKOP

Pada aspek pengembangan kapasitas, Kemenkop UKM menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pendamping koperasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta program magang nasional bagi 514 pengurus KDKMP di enam koperasi percontohan lintas sektor yang dinilai telah beroperasi dengan baik secara growth dan ekosistemnya.

*"Pengurus kami dorong belajar langsung dari koperasi yang sudah mapan, agar memahami kewirausahaan, konsolidasi anggota, dan pembangunan ekosistem yang inklusif,"* tambahnya.





Dalam penguatan ekosistem syariah, Kemenkop UKM berkolaborasi dengan KNEKS, khususnya pada koperasi berbasis pesantren. Selain pengembangan usaha, koperasi juga diarahkan menjadi simpul penghimpunan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan unit bisnis koperasi.

***"Ini bukan semata soal payment, tetapi bagaimana koperasi berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Program KNEKS kami elaborasi dalam gerakan KDKMP,"*** jelas Ibu Destry.

Ke depan, Aceh diharapkan dapat menjadi model nasional pengembangan KDKMP berbasis syariah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa KDKMP, termasuk KDKMP Syariah, masih berada pada tahap awal pengembangan. *"Ini masih proses. Model bisnisnya masih dibangun, dan pertumbuhannya akan terus kami kawal sebagai bagian dari gerakan nasional,"* pungkasnya.



## **Bagaimana Peran Kemenkop UKM Untuk Menjadikan KDKMP Syariah Sebagai Model Kelembagaan Koperasi Syariah Yang Berkelanjutan?**

Ibu Destry Anna Sari, menjelaskan bahwa peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan KDKMP Syariah saat ini difokuskan pada tahap pengenalan, penguatan pemahaman, dan penyiapan model bisnis yang berkelanjutan, dengan menjadikan Aceh sebagai salah satu rujukan awal.

*"Upaya yang sudah dilakukan di Aceh menjadi pembelajaran penting bagi kami. Ke depan, kami ingin melihat seperti apa model bisnis syariah yang benar-benar berjalan dan berkelanjutan,"* ujarnya.

Menurutnya, Kemenkop UKM menggandeng KNEKS untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan konsep bisnis berbasis syariah, terutama kepada 514 pengurus KDKMP yang mengikuti program magang nasional. Melalui kurikulum yang dikawal bersama KNEKS tersebut, para pengurus diperkenalkan pada alternatif unit bisnis syariah yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi.

***"Peran kami saat ini adalah memperkenalkan dan memastikan pemahaman tentang model bisnis syariah. Magang ini baru selesai, sehingga hasilnya masih dalam tahap awal,"*** jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa prioritas utama Kemenkop UKM saat ini adalah memastikan KDKMP dapat beroperasi terlebih dahulu. Tanpa operasional yang berjalan, penguatan model bisnis dan kelembagaan tidak dapat diukur secara nyata.

Untuk mendukung operasionalisasi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur gerai KDKMP, termasuk toko, gudang, dan jaringan distribusi. Pembangunan fisik gerai ditargetkan selesai secara bertahap, sehingga koperasi memiliki fondasi usaha yang lebih kuat.

Dalam praktiknya, keberhasilan operasional KDKMP sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus membaca kebutuhan anggota. Ia mencontohkan KDKMP di Banjarnegara yang memulai usaha dari pemenuhan kebutuhan pedagang sayur keliling.

*"Dari modal sekitar Rp 8 juta, dalam dua bulan bisa berkembang menjadi Rp 90 juta. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang sesuai kebutuhan anggota pasti berjalan,"* jelas Destry.

Contoh serupa juga terjadi di Sumatra Barat, di mana KDKMP memanfaatkan momentum tahun ajaran baru dengan menjual alat tulis sekolah. *"Nilainya mungkin tidak besar, tapi itu membangun kepercayaan diri pengurus bahwa koperasi bisa tumbuh dari kebutuhan nyata anggotanya,"* ungkapnya.

Pembelajaran ini menjadi dasar pengembangan unit bisnis berbasis syariah, termasuk pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari ekosistem koperasi yang berkelanjutan.





## Apa Saja Tantangan Terbesar Yang Dihadapi Dalam Mengadopsi Sistem Koperasi Syariah di Daerah?

Tantangan terbesar dalam mengadopsi sistem koperasi syariah di daerah terletak pada kesenjangan pemahaman dan kapasitas pengurus koperasi, khususnya dalam memulai dan mengembangkan unit bisnis berbasis syariah.

***"Informasi yang diterima pengurus sangat beragam. Di lapangan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana memulai bisnis koperasi itu sendiri,"*** ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya saat pelaksanaan pelatihan di berbagai provinsi, masih banyak pengurus KDKMP yang belum memahami langkah awal pengembangan usaha, meskipun berbagai program peningkatan kapasitas telah diberikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat cakupan KDKMP yang sangat luas.

***"Walaupun sebagian koperasi sudah mulai beroperasi, masih banyak yang bertanya harus mulai dari mana. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,"*** jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program magang nasional yang diikuti oleh 514 pengurus KDKMP, dengan dukungan kurikulum dari KNEKS, baru menjangkau sebagian kecil dari total koperasi yang ada. Program tersebut memberikan pemahaman praktis —

tentang pengembangan unit bisnis sesuai kebutuhan anggota, termasuk pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari ekosistem usaha koperasi syariah.

***Yang baru mendapatkan pembekalan ini masih sangat terbatas. Padahal kebutuhan untuk memperluas pemahaman itu sangat besar,"*** ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan replikasi dan perluasan program. Pelaksanaan magang sebelumnya melibatkan enam lokasi selama dua bulan dan memerlukan pendamping serta pemateri yang memiliki kompetensi khusus di bidang koperasi dan ekonomi syariah.

***"Tidak hanya koperasinya yang harus siap, tetapi juga siapa yang akan menjadi pemateri dan pendampingnya. Itu semua harus dipersiapkan,"*** tegas Destry.

Ke depan, Kemenkop UKM akan fokus pada perbaikan kurikulum magang nasional, perluasan mitra, serta penyiapan tenaga pendamping yang memahami kewirausahaan dan ekosistem koperasi syariah. Langkah ini bertujuan memperkuat pemahaman dasar pengurus koperasi terhadap konsep syariah, mulai dari pengenalan model bisnis hingga konsolidasi kebutuhan anggota.

***"Saat ini banyak yang sudah diperkenalkan, tetapi belum benar-benar mengenal. Itu yang akan terus kami perkuat,"*** pungkasnya.





## **Sejauh Mana KDKMP Syariah Dapat Berperan Dalam Mendukung Visi Indonesia Untuk Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka?**

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) termasuk KDKMP Syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, terutama melalui penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

**"Sumber daya manusia dan sumber daya alam itu ada di desa dan kelurahan. Tantangannya adalah bagaimana nilai tambahnya bisa dinikmati oleh masyarakat di titik paling luar,"** ujar Ibu Destry.

Menurutnya, tujuan besar KDKMP sejalan dengan visi Presiden, yakni pemerataan pendapatan, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ekonomi secara kolektif untuk kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dinilai selaras dengan tujuan tersebut karena menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

*"Kalau masyarakat merasa ini kepentingan bersama, maka tujuan syariah dan tujuan pemerataan ekonomi nasional bisa tercapai bersamaan,"* jelasnya.

KDKMP diposisikan sebagai simpul konsolidasi berbagai program pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, bantuan sosial seperti PKH, —

bantuan tunai dan nontunai, hingga program pemberdayaan keluarga dapat disinergikan agar lebih produktif dan berkelanjutan.

*"Uang bantuan itu tidak berhenti sekali belanja. Lewat koperasi, ada perputaran usaha dan anggota juga mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU),"* ungkap Destry.

Ia mencontohkan bagaimana KDKMP dapat menjadi captive market bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal. Dengan jaringan distribusi yang lebih pendek, koperasi dapat menyediakan barang dengan harga lebih kompetitif tanpa mematikan usaha kecil.

*"Warung kecil justru bisa belanja di koperasi. Harga lebih bersaing karena koperasi bisa langsung dari distributor utama,"* tambahnya.

Dalam konteks ekonomi syariah, KDKMP Syariah juga membuka peluang pengembangan unit usaha berbasis nilai keberlanjutan, seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, hingga ekonomi sirkular. Ibu Destry mencontohkan praktik baik koperasi pesantren yang mengelola sampah organik dan minyak jelantah menjadi pupuk dan sumber pendapatan baru.

**"Sampah organik, minyak jelantah, itu bisa jadi lini bisnis. Di satu lokasi, pengelolaan ini bahkan bisa menyerap ratusan tenaga kerja,"** tuturnya.

Lebih lanjut, KDKMP Syariah dinilai mampu menjadi pathway ekonomi syariah yang inklusif, tidak terbatas hanya bagi komunitas tertentu.



"Ekonomi syariah itu tidak harus eksklusif. Ketika dikonsolidasikan dalam koperasi, semua orang bisa melihat bahwa ini adalah bisnis yang nyata dan berkelanjutan," tegasnya.

Ke depan, Kemenkop UKM berharap model-model KDKMP Syariah yang telah terbukti berjalan dapat diangkat dan direplikasi secara lebih luas.

“

**Kita ini kurang contoh. Kalau yang sudah sukses diceritakan, kepercayaan diri akan tumbuh. Orang lebih mudah percaya pada praktik nyata daripada teori,” tutup Destry.**



INSIGHTFUL

# PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

Status Data: 20 Januari 2026

Jumlah Koperasi Berakun  
Simkopdes (Microsite)

**78.534**

Koperasi Memiliki Gerai  
(min. 1)

**28.873**

Total Gerai Koperasi Aktif

**40.471**

Jumlah Kemitraan

**29.774**

Dari

**6.487**

Koperasi Desa/ Kelurahan

Pengurus Koperasi Terlibat

**694.445**



**487.267**

Laki-laki



**207.178**

Perempuan

Anggota Koperasi Terlibat

**1.712.102**



**1.054.167**

Laki-laki



**657.935**

Perempuan

# PERAN KNEKS



## Bagaimana Posisi KDKMP Syariah Dalam Peta Besar Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional?

Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah KNEKS, Bagus Aryo, PhD, menegaskan bahwa terkait KDKMP Syariah dan hubungannya dengan Meksi. KDKMP Syariah merupakan bagian dari subpilar yang berkaitan dengan modernisasi koperasi syariah, khususnya pada sektor produksi dan keuangan mikro. Dengan demikian, KDKMP Syariah termasuk dalam Pilar Ketiga, yaitu penguatan keuangan syariah.

***"Jadi diharapkan nanti KDKMP syariah bertindak sebagai koperasi sektor produksi yang akan membantu penguatan keuangan syariah secara umum"*** ujar Bagus.

Namun demikian, peran KDKMP tidak hanya terbatas pada aspek keuangan syariah, melainkan juga berkaitan dengan pengembangan produk halal, peningkatan efisiensi rantai nilai pasok, serta aspek pendukung lainnya.

*Bagus Aryo, PhD*

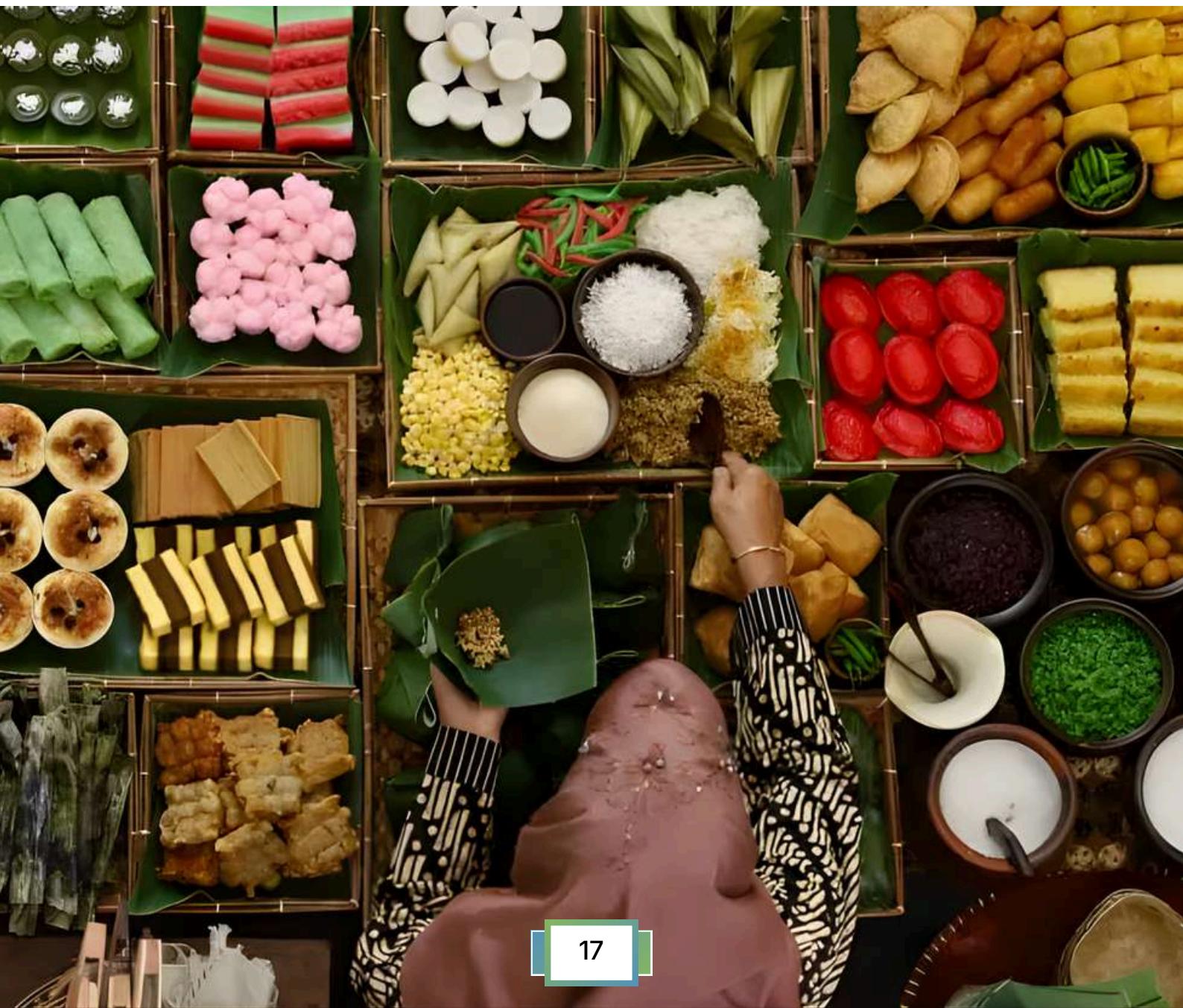
DEPUTI DIREKTUR LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO SYARIAH KNEKS

Pemerintah berharap koperasi syariah dalam skema KDKMP dapat berfungsi sebagai off-taker atas berbagai hasil produksi. Peran tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri kreatif, seperti kerajinan tangan dan produk sandang. Melalui peran ini, KDKMP diharapkan mampu menyerap hasil produksi secara langsung dan menyalurnyanya kepada pengguna akhir atau masyarakat secara luas.



***"Kami berharap KDKMP dapat berperan sebagai off-taker yang secara langsung memasarkan produk kepada pengguna akhir atau masyarakat luas. Melalui peran tersebut, mampu mempersingkat rantai distribusi dengan mengurangi peran perantara, sehingga produk dapat disalurkan langsung dari produsen kepada masyarakat"*** tambahnya.

Dengan adanya peran tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih singkat karena berkurangnya keterlibatan perantara, seperti pengepul atau tengkulak. Hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih langsung antara produsen dan konsumen. Pada akhirnya, KDKMP diharapkan dapat berperan sebagai off-taker bagi berbagai produk dan hasil bumi, sekaligus mendorong efisiensi distribusi dan penguatan ekosistem ekonomi syariah.





## Apa Keunggulan Kelembagaan KDKMP Syariah Dibanding Model Koperasi Konvensional?

Apabila berbicara mengenai keunggulan, maka hal tersebut perlu dikembalikan pada tujuan utama pembentukan KDKMP. KDKMP memiliki 13 tujuan utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, memberikan pelayanan yang sistematis dan cepat. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, koperasi merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelima, melakukan modernisasi sistem dan manajemen perkoperasian. Keenam, menekan harga di tingkat konsumen agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Ketujuh, meningkatkan harga di tingkat petani atau produsen sehingga nilai tukar menjadi lebih baik.

Dengan mekanisme tersebut, produk dapat dibeli dari petani atau produsen dengan harga yang lebih tinggi, namun tetap dijual kepada konsumen dengan harga yang terjangkau karena adanya efisiensi distribusi. Kedelapan, menekan pergerakan tengkulak atau perantara. Kesembilan, memperpendek rantai pasok agar tidak terlalu panjang, sehingga harga tetap terkendali. Kesepuluh, meningkatkan inklusi keuangan. Selanjutnya, KDKMP juga berperan sebagai akselerator, konsolidator, dan aggregator. Kedua belas, menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Ketiga belas, berkontribusi dalam pengendalian inflasi.

Berdasarkan ketiga belas tujuan tersebut, keunggulan KDKMP Syariah menjadi lebih jelas.

"Jika dibandingkan dengan skema konvensional, KDKMP Syariah memiliki instrumen yang lebih lengkap untuk menjawab tantangan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi," ungkap Bagus. Menurutnya, KDKMP konvensional umumnya belum dibekali dengan mekanisme khusus untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut secara komprehensif.

Keunggulan utama KDKMP Syariah terletak pada integrasi keuangan sosial syariah.

**"KDKMP Syariah tidak hanya memiliki delapan gerai standar, tetapi juga dua gerai tambahan, yaitu gerai zakat dan gerai wakaf,"** ujarnya. Keberadaan gerai zakat dan wakaf menunjukkan bahwa KDKMP Syariah mengintegrasikan keuangan sosial syariah ke dalam model bisnisnya. Melalui integrasi tersebut, gerai zakat dan wakaf dapat berperan langsung dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.

Ia menambahkan, **"Gerai zakat dan wakaf secara otomatis dapat membantu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi."** Menurutnya, aspek inilah yang membedakan KDKMP Syariah dengan skema konvensional yang umumnya masih berorientasi pada aktivitas bisnis semata dan belum mengintegrasikan fungsi sosial atau intermediasi sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, integrasi keuangan sosial syariah menjadi salah satu kekuatan utama KDKMP Syariah.

“

*KDKMP Syariah tidak hanya memiliki delapan gerai standar, tetapi juga dua gerai tambahan, yaitu gerai zakat dan gerai wakaf,”*





## Faktor Apa Yang Dapat Menjadikan KDKMP Syariah Penting Untuk Diperluas Secara Nasional?

Perluasan cakupan KDKMP menjadi hal yang sangat penting, terutama karena sejak awal skema ini dirancang untuk menjawab persoalan kemiskinan. Di mana hal ini dalam konteks tertentu, belum sepenuhnya dimiliki oleh skema konvensional.

*"Ketika kita berbicara mengenai zakat, infak, dan sedekah, maka terdapat delapan golongan penerima manfaat atau asnaf, seperti fakir dan miskin," ujar Bagus.*

Ia menjelaskan bahwa pembukaan gerai zakat, infak, dan sedekah dalam KDKMP Syariah memberikan kemudahan akses bagi kelompok masyarakat rentan.

***"Dengan adanya gerai ini, kelompok perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk perempuan kepala keluarga, dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan proses yang lebih lancar," tambahnya.***

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa jumlah KDKMP Syariah saat ini masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan skema konvensional.

*"Memang harus diakui, jumlah KDKMP Syariah saat ini belum sebanyak yang konvensional," ungkapnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memiliki latar belakang dan alasan tersendiri.*

***"Pertanyaan mengenai mengapa jumlahnya belum banyak dapat dijelaskan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya,"***  
***pungkasnya.***

Meskipun saat ini jumlah dan jangkauan KDKMP Syariah masih relatif terbatas dibandingkan koperasi konvensional, hal tersebut justru mempertegas urgensi replikasi dan perluasan model ini. KDKMP Syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan fungsi bisnis, sosial, dan pemberdayaan dalam satu ekosistem koperasi berbasis prinsip syariah.



## Apakah KDKMP Syariah Dapat Mendukung Peningkatan Keuangan Syariah di Masyarakat?

KDKMP dinilai sangat mampu mendukung penguatan keuangan syariah. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan delapan gerai standar yang menjadi bagian dari model KDKMP. Delapan gerai standar tersebut meliputi gerai kantor koperasi, gerai obat atau layanan kesehatan, gerai klinik desa, gerai sembako, gerai logistik, gerai pergudangan, gerai kegiatan usaha lainnya, serta gerai unit simpan pinjam.

Ia menjelaskan bahwa baik KDKMP Syariah maupun KDKMP konvensional secara otomatis berkontribusi dalam penguatan keuangan syariah, khususnya melalui keberadaan gerai unit simpan pinjam. *"Melalui gerai unit simpan pinjam, terjadi penetrasi langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengajukan layanan simpan dan pinjam berbasis syariah melalui KDKMP,"* jelas Bagus..

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembukaan gerai unit simpan pinjam syariah sebaiknya tidak dilakukan sejak tahap awal operasional. *"Kami mendorong agar KDKMP Syariah membuka gerai simpan pinjam secara mandiri pada tahun kedua atau ketiga, bahkan hingga tahun keempat,"* ungkapnya.

Menurutnya, pada fase awal, KDKMP Syariah lebih tepat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang telah berpengalaman.

*"Pada tahap awal, KDKMP Syariah dapat bekerja sama dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, BTM Muhammadiyah, LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maupun lembaga koperasi syariah lain yang bergerak di bidang simpan pinjam maupun BPRS,"* lanjutnya. Kerja sama tersebut dinilai penting mengingat kegiatan simpan pinjam memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, terutama bagi KDKMP yang belum memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Melalui skema kerja sama tersebut, KDKMP tetap dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, KDKMP Syariah diharapkan menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan.



## **Apa Tantangan Yang Perlu Dibenahi Agar KDKMP Syariah Bisa Menjadi Role Model Koperasi Syariah Modern?**

KDKMP Syariah masih berada pada tahap awal pengembangan sebagai entitas kelembagaan yang relatif baru, sehingga memerlukan pembenahan menyeluruh agar dapat berperan sebagai *role model* koperasi syariah modern. Hal tersebut juga menjadi tantangan yang harus dijawab oleh KDKMP Syariah sebagai *role model* koperasi syariah modern.

Namun demikian, tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh KDKMP Syariah, melainkan juga oleh KDKMP konvensional. “*Pada dasarnya, baik KDKMP Syariah maupun konvensional berada pada tahap awal pengembangan. KDKMP merupakan entitas yang relatif baru dan masih berada pada fase awal, sehingga membutuhkan banyak pembenahan,*” ujar Bagus.

Ia menjelaskan bahwa tantangan tersebut terlihat jelas dari hasil pemagangan dan pelatihan KDKMP yang direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi. “*Saya kebetulan menjadi narasumber nasional dalam program pemagangan KDKMP. Terdapat 514 KDKMP yang mengikuti pemagangan dan pelatihan yang tersebar di enam lokasi,*” jelasnya. Lokasi pemagangan tersebut meliputi Bandung (Ciwidey), Kuningan, Cilacap, Lamongan, Malang, serta Maros di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pemagangan tersebut, ia menilai bahwa tantangan utama terletak pada keterbatasan pengalaman dan kapasitas pengurus dalam praktik perkoperasian. Sebagaimana tercermin dari hasil pemagangan nasional KDKMP yang menunjukkan minimnya latar belakang pengelolaan koperasi di kalangan pengurus.

**“Dalam satu kelas (batch) dari sekitar 40 peserta, hanya tiga orang yang pernah berkoperasi, dan itu pun hanya satu orang yang pernah menjadi pengurus, sementara dua lainnya hanya berstatus sebagai anggota,”**

ujarnya

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya pemahaman dan kemampuan pengelolaan koperasi. “*Pengalaman dan kapasitas pengurus masih sangat terbatas, sehingga perbaikan harus dilakukan di semua lini,*” tambahnya. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan baik pada KDKMP konvensional maupun KDKMP Syariah, khususnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola.

Ia menekankan bahwa apabila KDKMP ingin menjadi panutan atau contoh koperasi modern, maka penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemahaman yang seimbang terhadap fungsi bisnis dan fungsi sosial koperasi menjadi prioritas utama. Dengan peningkatan tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia, KDKMP diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai koperasi modern yang berkelanjutan.



## **Bagaimana KNEKS Melihat Hubungan Antara KDKMP Syariah dan Penguatan Rantai Nilai Halal Nasional?**

KNEKS memandang KDKMP Syariah sebagai simpul strategis dalam penguatan rantai nilai halal nasional, khususnya melalui perannya dalam memperpendek rantai pasok dan meningkatkan efisiensi distribusi produk halal. KDKMP Syariah diharapkan berfungsi sebagai off-taker langsung dari produsen, seperti petani dan pelaku usaha lokal, sehingga mampu memangkas berbagai lapisan perantara dalam rantai distribusi dan menghubungkan produsen secara lebih langsung dengan konsumen akhir. **"Melalui peran tersebut, KDKMP Syariah dapat menghilangkan setidaknya lima lapisan distribusi sebelum produk sampai ke konsumen,"** ujar bagus.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KDKMP Syariah didorong untuk menerapkan empat prinsip atau karakteristik utama dalam seluruh aktivitasnya yang menjadi dasar implementasi KDKMP Syariah. Keempat prinsip atau karakteristik utama tersebut yaitu memastikan kehalalan produk dan jasa, menggunakan rekening dan layanan perbankan syariah atau BMT atau KSPPS atau LKMS, memperoleh pembiayaan berbasis syariah, serta memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. **"Dengan memastikan kehalalan produk dan jasa, KDKMP secara otomatis akan mendukung penguatan rantai pasok dan rantai nilai halal,"** jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pembentukan KDKMP Syariah masih berada pada tahap awal sehingga implementasi keempat fondasi tersebut dilakukan secara bertahap.

*"Pada tahap awal, yang terpenting adalah memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan telah halal terlebih dahulu,"* ujarnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa *"Pada dasarnya, praktik usaha KDKMP sudah berjalan secara halal. Tantangannya adalah mendorong penerapan aspek syariah lainnya secara bertahap, seperti penggunaan rekening perbankan syariah dan skema pembiayaan syariah sampai adanya DPS,"* ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang mengajarkan bahwa apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, maka pelaksanaannya tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya.

***"Jika keempat prinsip tersebut belum dapat diterapkan sekaligus, maka mulailah dari yang paling memungkinkan, seperti memastikan kehalalan produk dan jasa terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan aspek lainnya,"*** tutupnya.

Pendekatan bertahap ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan memungkinkan KDKMP Syariah berkontribusi secara nyata dan berkelanjutan dalam penguatan ekosistem dan rantai nilai halal nasional.



## Apa Indikator Keberhasilan Yang Perlu Dijaga Untuk Memastikan KDKMP Syariah Tetap Berkelanjutan?

Keberlanjutan KDKMP Syariah ditentukan oleh beberapa indikator utama yang mencerminkan kemampuan koperasi untuk berkembang secara mandiri dan profesional. Terkait indikator penilaian KDKMP, baik Syariah maupun konvensional, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi perhatian. "Indikator pertama adalah keberlanjutan usaha," ujarnya. Menurutnya, keberlanjutan usaha menjadi penting karena sebagian besar KDKMP masih berada pada tahap awal pengembangan.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke berbagai provinsi serta pelaksanaan program pemagangan dan pelatihan yang diikuti oleh 514 KDKMP, sebagian besar KDKMP masih tergolong baru dan belum memiliki unit usaha yang berjalan.

"Dari pengamatan kami, jumlah KDKMP yang benar-benar sudah memiliki usaha dan berjalan secara aktif masih sangat terbatas, bahkan diperkirakan berada di bawah 10 persen," ungkapnya. Dalam perkiraan optimistis sekalipun, jumlah tersebut dinilai belum mencapai 15 persen.

Indikator kedua adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). "Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas menjadi kebutuhan mendesak, baik melalui peningkatan —

keterampilan, pengetahuan, maupun kompetensi teknis," jelasnya. Ia menekankan bahwa proses *upskilling* dan upgrading SDM menjadi kunci agar KDKMP mampu dikelola secara profesional.

Indikator ketiga berkaitan dengan tata kelola koperasi. "Kami melihat masih banyak KDKMP yang belum memahami tata kelola koperasi yang baik, termasuk dalam hal pengelolaan usaha, pembukuan, dan administrasi," ujarnya. Menurutnya, pemahaman yang memadai terhadap tata kelola sangat menentukan keberlanjutan dan kesehatan koperasi dalam jangka panjang.

Selain ketiga indikator utama tersebut, terdapat sejumlah aspek lain yang juga penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah kemampuan koperasi dalam mencegah dan mengatasi potensi kecurangan atau *fraud*.

**"Kita harus menyadari bahwa risiko penyelewengan merupakan tantangan nyata, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat,"**

tegasnya.



Aspek lainnya adalah kemampuan KDKMP dalam mengatasi keterbatasan permodalan dan likuiditas. Ia menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mencari sumber pendanaan. Menurutnya, pola kemitraan seperti ini sangat penting karena mendorong kemandirian koperasi. KDKMP tidak boleh sepenuhnya bergantung pada bantuan atau pembiayaan dari pemerintah. Mereka harus mampu menjalin kemitraan dan membangun jejaring usaha secara mandiri," tegasnya.

Ia mencontohkan praktik kemitraan yang dilakukan KDKMP di Sulawesi Tenggara. "*Di Kendari, KDKMP menjalin kerja sama dengan BMT. Melalui kemitraan ini, BMT menyediakan layanan semacam mobile cooperative banking yang mendukung operasional KDKMP,*" jelasnya. Selain itu, BMT juga membantu dalam penyediaan permodalan, misalnya untuk usaha sembako dengan skema bagi hasil.

Ia menambahkan bahwa pada hakikatnya koperasi merupakan badan usaha yang dibangun dari, oleh, dan untuk anggota. "*Kekuatan utama koperasi berasal dari partisipasi anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dan mekanisme internal lainnya,*" tutupnya. Oleh karena itu, penguatan modal internal dan tata kelola yang baik menjadi fondasi ideal bagi keberlanjutan KDKMP ke depan.



Selain itu ada aspek penting yang tidak boleh dilupakan yaitu adopsi teknologi atau digitalisasi. Era saat ini apabila tertinggal secara teknologi maka akan sulit untuk berkembang dan hampir disekeliling kita sudah mengandalkan digitalisasi baik itu sistem pembayaran (contoh: QRIS), marketing, pembukaan rekening (untuk lembaga keuangan), pembukuan, akuntabilitas, pengawasan dllnya.

Dengan fokus pada indikator-indikator ini, ke depan KDKMP Syariah diharapkan mampu mempertahankan keberlanjutan, memperkuat daya saing, dan menjadi model koperasi syariah modern yang profesional dan inklusif.



## Pelajaran Apa Dari Implementasi Awal Yang Paling Penting Untuk Diperhatikan ke Depan?

Dalam pelaksanaan awal KDKMP Syariah, Bagus menegaskan beberapa pelajaran penting yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan ke depan. Pertama, **penguatan kapasitas tata kelola dan mitigasi risiko**, termasuk kemampuan menghadapi fraud dan penyelewengan, merupakan fondasi agar koperasi dapat beroperasi secara aman dan profesional. Kedua, **ketahanan modal dan likuiditas** menjadi indikator penting; KDKMP harus mampu mengelola keterbatasan modal dengan inovasi, kemitraan strategis, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Ketiga, **kemandirian koperasi** harus dijaga dengan memaksimalkan kontribusi anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus, sehingga koperasi tidak bergantung pada bantuan atau pembiayaan pemerintah. Pelajaran ini menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP Syariah bergantung pada keseimbangan antara fungsi bisnis, inovasi, tata kelola profesional, dan kemandirian kelembagaan, sehingga dapat berkembang menjadi model koperasi syariah modern yang berkelanjutan.



## Saat Ini Masih Belum Banyak KDKMP Syariah, Apa Tantangan Yang Dihadapi Terkait Ini?

Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 6.304 KDKMP yang berbadan hukum Syariah.

***"Dari jumlah tersebut, 6.172 berada di Aceh, karena Aceh menerapkan ketentuan wajib berbasis Syariah, sedangkan sisanya tersebar di tujuh provinsi lain,"*** Ujarnya

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam memperluas KDKMP Syariah meliputi kurangnya pemahaman tentang opsi badan hukum syariah di kalangan calon pengelola, notaris, serta aparat di tingkat desa dan kelurahan, sehingga banyak KDKMP memilih berbadan hukum konvensional.

*"Ketika kami melakukan kunjungan ke berbagai provinsi, banyak yang baru mengetahui adanya pilihan Syariah. Begitu mereka mengetahui, banyak yang tertarik, tetapi pada saat itu informasinya belum tersosialisasi dengan baik,"* tambahnya.

Selain itu, biaya dan prosedur administratif untuk perubahan badan hukum juga menjadi hambatan tambahan bagi KDKMP yang ingin bertransformasi menjadi Syariah. "Untuk mengganti badan hukum, diperlukan minimal Rp2,5 juta untuk biaya notaris dan masih perlu mengadakan rapat anggota, dan penyesuaian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),

serta pengunggahan kembali ke sistem administrasi badan hukum (SABH)" jelasnya.

Ia menambahkan, untuk mengatasi kendala ini, KNEKS mendorong implementasi prinsip syariah secara bertahap, meliputi kehalalan produk dan jasa, penggunaan rekening dari lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah dan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, serta penambahan gerai zakat dan wakaf produktif untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan sosial, tanpa membebani koperasi dengan perubahan badan hukum di awal pengembangan.

*"Gerai zakat berfungsi untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari komunitas atau desa/kelurahan, yang kemudian didistribusikan kembali untuk penanggulangan kemiskinan. Sementara gerai wakaf fokus pada wakaf produktif, diharapkan berbentuk uang atau modal usaha, bukan tanah, agar hasil dari pengolahan wakaf tersebut bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat,"* jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang aman dan sesuai prinsip syariah. *"Dana wakaf dan zakat harus tetap diinvestasikan pada bisnis yang aman dan mampu menghasilkan yield, sehingga manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat, tanpa mengurangi pokoknya,"* pungkasnya.





## Apa Solusi Agar KDKMP Syariah Dapat Lebih Banyak Kuantitasnya?

KNEKS menilai peningkatan jumlah KDKMP Syariah dapat dicapai melalui sosialisasi dan literasi yang masif, baik secara offline maupun online. Ia mengungkapkan, dalam kunjungannya ke berbagai Provinsi bertemu dengan Dinas Koperasi untuk menjelaskan peran KDKMP dan literasi terkait koperasi Syariah. "Kami menyadari bahwa di berbagai provinsi, literasi mengenai KDKMP Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, KNEKS akan bekerja sama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif, baik secara offline maupun online," tutur Bagus.

Ia menegaskan bahwa upaya sosialisasi sudah dilakukan secara online di 31 provinsi bersama KDEKS. Contoh lain melalui program pemagangan nasional, yang melibatkan 514 peserta (KDKMP), menunjukkan bahwa sosialisasi langsung menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan implementasi KDKMP Syariah. **"Meski begitu, karena ini hal baru, tidak semua orang dapat cepat memahami dan menyebarkan informasi tersebut. Kami tetap mendorong sosialisasi lebih lanjut, baik melalui platform online maupun kegiatan tatap muka"** ujarnya. Ia optimistis bahwa pada akhir 2026, sosialisasi ini akan semakin masif melalui kerja sama KNEKS, Kemenkop, dan mitra lainnya.

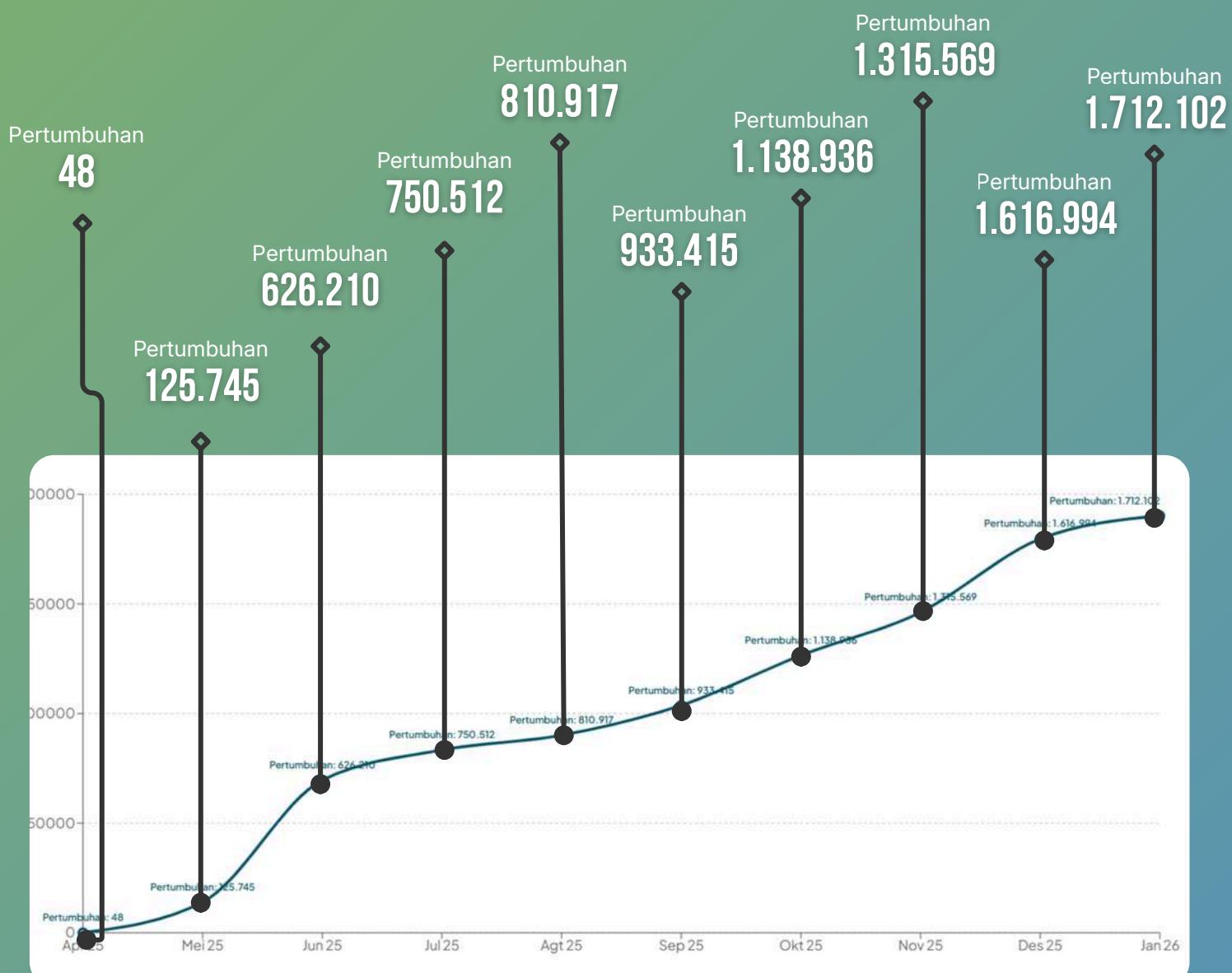
Selain itu, ia menambahkan bahwa dukungan pimpinan dan kebijakan kementerian terkait sangat penting untuk memperluas implementasi KDKMP Syariah. Mengingat KDKMP tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan sosialisasi yang sistematis dan dukungan kebijakan, diharapkan kuantitas dan implementasi KDKMP yang menerapkan prinsip Syariah dapat meningkat secara signifikan di seluruh provinsi pada periode mendatang.





Data per 20 Januari 2026

# PERTUMBUHAN ANGGOTA KOPERASI



# EVALUASI AKADEMIS



## Bagaimana Model KDKMP Syariah dinilai Dari Perspektif Akademisi Administrasi Bisnis dan kelembagaan Modern?

Dari perspektif akademisi administrasi bisnis, Ida menyampaikan bahwa model KDKMP Syariah dinilai sangat positif karena berperan sebagai *mode effect player* dalam pengembangan ekonomi di tingkat pedesaan maupun kelurahan.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi administrasi bisnis dan kelembagaan modern, KDKMP Syariah merupakan model berbasis komunitas (*community-based model*). "KDKMP memiliki karakteristik *social enterprise*, yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan basis komunitas, koperasi ini selaras dengan prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan kemanfaatan sosial," tambah Ida.

Selain itu, ia menekankan bahwa kehadiran model bisnis syariah berbasis komunitas ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan mitra strategis, memperkuat ekosistem, serta meningkatkan dampak sosial ekonomi.

"Hal ini akan memperkuat keberlanjutan model bisnis dan keterlibatan komunitas," jelasnya.

Antusiasme peserta magang pada pelatihan KDKMP juga menunjukkan minat yang tinggi dalam mengadopsi model kolaboratif dan berbasis syariah. Peserta magang sangat antusias, terutama ketika mereka memahami peluang kolaboratif yang bisa dimasukkan dalam komunitas KDKMP Syariah. Ini menunjukkan bahwa model bisnis syariah berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih luas," ujarnya.

*Prof. Dr. Ida Hindarsyah,  
S.Sos., M.M., M.Si*

KETUA PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI BISNIS UNIVERSITAS  
PASUNDAN





## Aspek Kelembagaan Apa yang Dianggap Sebagai Kekuatan Utama KDKMP Syariah Berdasarkan Analisis Akademik?

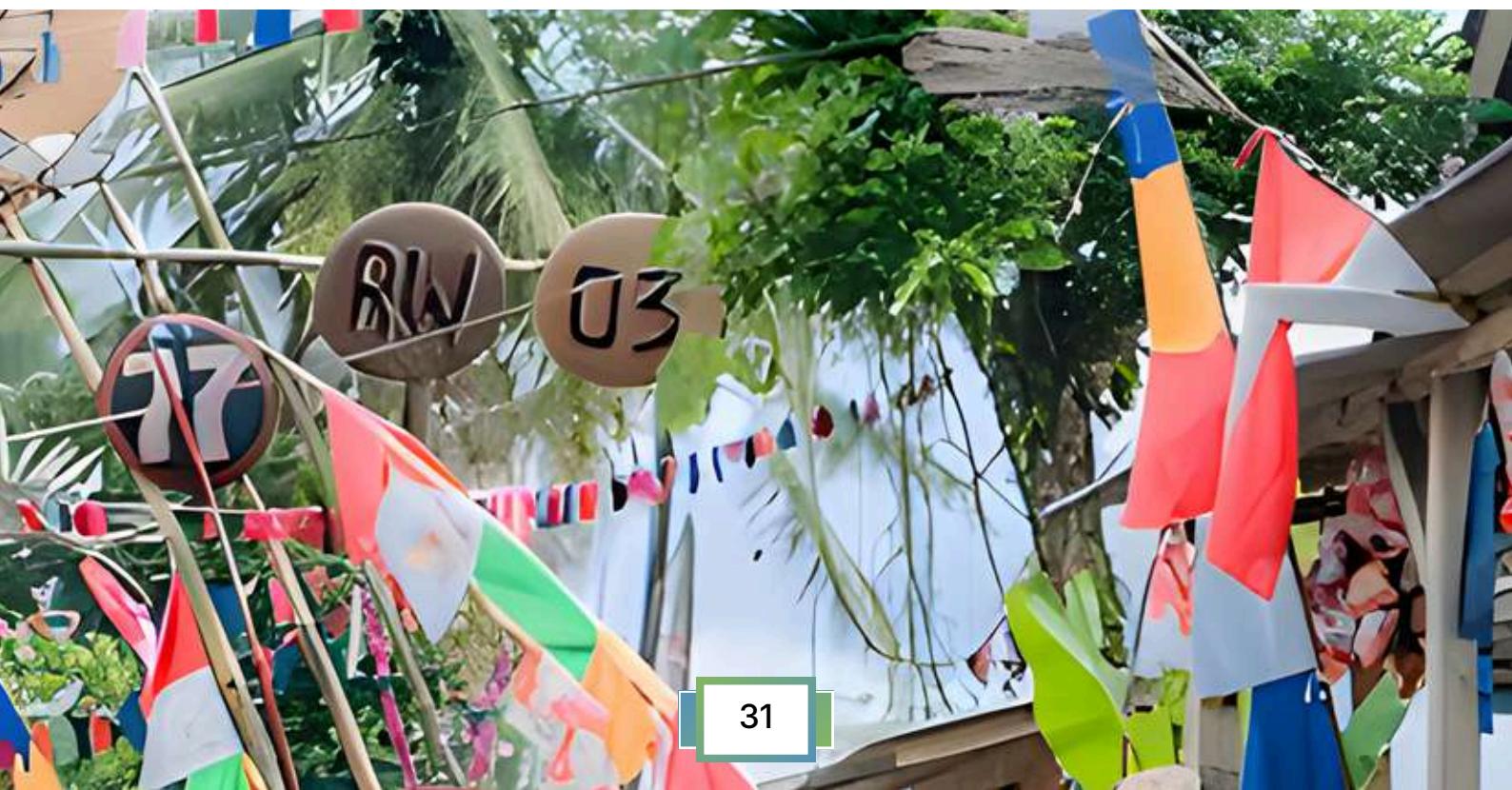
Kekuatan utama KDKMP Syariah terletak pada prinsip kooperasinya, terutama dalam hal keterbukaan. "Prinsip keterbukaan menjadi fondasi penting. Dengan adanya keterbukaan, anggota dapat dengan leluasa mengaktifkan berbagai kegiatan di koperasi yang bersangkutan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa, keterbukaan dalam pengelolaan koperasi dan keanggotaan memungkinkan partisipasi luas, sekaligus mendorong aktivasi kegiatan ekonomi berkesinambungan.

Selain keterbukaan, aspek keanggotaan yang aktif turut menjadi kekuatan signifikan bagi KDKMP Syariah. Oleh karena itu, pembekalan pemahaman mendalam terkait etika pengelolaan, transparansi, dan mekanisme pembagian hasil yang adil bagi anggota sangat diperlukan.

Ia menekankan bahwa keterlibatan anggota bukan sekadar formalitas, tetapi harus diwujudkan secara nyata.

*"Transparansi dan partisipasi aktif anggota menjadi kunci agar koperasi dapat berfungsi optimal, sehingga seluruh kegiatan dan keputusan dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari seluruh anggota,"* tegasnya.

Fondasi ini memperkuat kelembagaan berbasis komunitas sekaligus meneguhkan nilai syariah dan pemberdayaan ekonomi anggota. Dengan fondasi ini, KDKMP Syariah tidak hanya menjadi model koperasi modern berbasis komunitas, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan sosial dan ekonomi anggota yang berkesinambungan.





## Elemen Tata Kelola Apa Yang Masih Memerlukan Perbaikan Menurut Sudut Pandang Teori Administrasi dan Manajemen Organisasi?

Dari sudut pandang akademisi administrasi dan manajemen organisasi, elemen tata kelola yang masih perlu diperkuat mencakup kesiapan SDM dalam mengelola operasional dan managerial secara kompeten. "Banyak pengurus ditunjuk bukan berdasarkan kompetensinya. Akibatnya, ketika mereka terjun ke lapangan, seringkali bingung mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengurus juga mengalami keterbatasan dalam hal literasi dan akses informasi mengenai KDKMP Syariah itu sendiri. "Kami menemukan bahwa pengurus masih terbatas pemahamannya terkait struktur internal, termasuk SPI (Sistem Pengendalian Internal), serta sumber modal koperasi, apakah berasal dari anggota sendiri atau bantuan pemerintah" jelasnya.

Terbatasnya pemahaman pengurus mengenai prinsip-prinsip dasar pembentukan koperasi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya terletak pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah digitalisasi. Pemanfaatan teknologi yang masih minim menunjukkan perlunya pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung operasional KDKMP Syariah yang profesional, efisien, dan transparan. Beliau menjelaskan bahwa "Setiap desa atau kelurahan diwajibkan membentuk tujuh sektor bisnis. Namun, pengurus masih belum memiliki kapasitas untuk menghimpun dan mengelola data terkait bisnis tersebut secara efektif. Tantangan ini harus menjadi fokus perbaikan agar KDKMP dapat dijalankan secara profesional," tuturnya.





## Tantangan Utama Apa Yang Terlihat Dalam Implementasi KDKMP Syariah Ketika Dikaji Melalui Pendekatan Akademik?

Ida menuturkan bahwa, implementasi KDKMP Syariah menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan SDM, kompetensi teknis, dan pemahaman regulasi koperasi. Banyak pengurus ditunjuk tanpa pertimbangan kompetensi, sehingga mengalami kesulitan dalam pengelolaan operasional, pengambilan keputusan, dan penerapan digitalisasi untuk mengelola tujuh sektor bisnis. Keterbatasan modal dan ketidakpastian regulasi menjadi hambatan tambahan. Penguatan profesionalisme, inovasi, dan kapasitas SDM menjadi kunci agar KDKMP Syariah dapat dijalankan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.



## Bagaimana Penilaian Terhadap Kesiapan Dan Kompetensi SDM Koperasi Syariah Jika Dibandingkan Dengan Standar Akademik?

Mekanisme manajerial KDKMP Syariah dapat dilihat dari perspektif Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian, pengabdian, dan pembelajaran.

*"Pertama, dari sisi penelitian, KDKMP Syariah dapat menjadi lahan penelitian bagi dosen. Kehadirannya memungkinkan penelitian yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus memperkuat relevansi penelitian dengan kebutuhan nyata di lapangan," ujarnya.*

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendampingi KDKMP untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kelembagaan. Pendampingan ini mencakup peningkatan keterampilan pengurus, penguatan tata kelola, dan pengembangan ekosistem yang mendukung keberlangsungan operasional koperasi.

*"Dengan bimbingan akademisi, tantangan manajerial yang dihadapi pengurus dapat diatasi, sehingga kapasitas mereka meningkat secara signifikan," tambahnya.*

Lebih lanjut, keterlibatan mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga dianggap sebagai komponen penting. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata di lapangan, mengaitkan teori dengan praktik, serta membantu pengembangan KDKMP. Narasumber menekankan bahwa keterlibatan ini juga memperkuat promosi dan branding KDKMP maupun institusi perguruan tinggi.





## **Sejauh Mana Mekanisme Manajerial Dalam KDKMP Syariah Mencerminkan Prinsip - Prinsip Administrasi Bisnis Modern?**

Meninjau dari perspektif administrasi modern, secara keseluruhan, kesiapan SDM KDKMP Syariah belum maksimal. Meskipun beberapa pengurus menunjukkan kemampuan memadai, penguatan kapasitas SDM tetap menjadi kebutuhan utama. Menurutnya, kesiapan dan kompetensi SDM KDKMP Syariah harus berbasis inovasi dan kemampuan adaptasi. "Dalam pelatihan yang kami selenggarakan, pengurus diminta untuk merancang model bisnis inovatif di luar tujuh bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar mereka terbiasa melihat potensi dan peluang unik dari setiap daerah," jelasnya

Pendekatan inovasi ini harus dikombinasikan dengan manajemen proyek.

"Dengan pendekatan proyek manajemen, setiap inovasi disesuaikan dengan kompetensi tim. Kami memperkenalkan metode pembentukan tim berbasis 'hustler, hacker, dan hipster' agar pengurus memahami bahwa koperasi bisa membangun tim seperti startup. Tujuannya adalah membentuk tim yang benar-benar sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota," tambahnya.

Selain inovasi, aspek teknologi menjadi fokus utama karena dalam administrasi modern, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan agar pengelolaan tujuh sektor bisnis KDKMP dapat lebih mudah dan efisien. **"Lebih dari itu, keberanian untuk mengambil keputusan, beradaptasi dengan dinamika lingkungan, dan menghadapi isu-isu stabilitas perlu dimiliki oleh pengurus"** tambahnya.

Pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk pengelolaan sektor bisnis secara efektif, dan kesiapan beradaptasi dengan lingkungan serta keberanian mengambil keputusan menjadi penentu keberhasilan implementasi administrasi modern yang profesional, transparan, dan sesuai syariah.

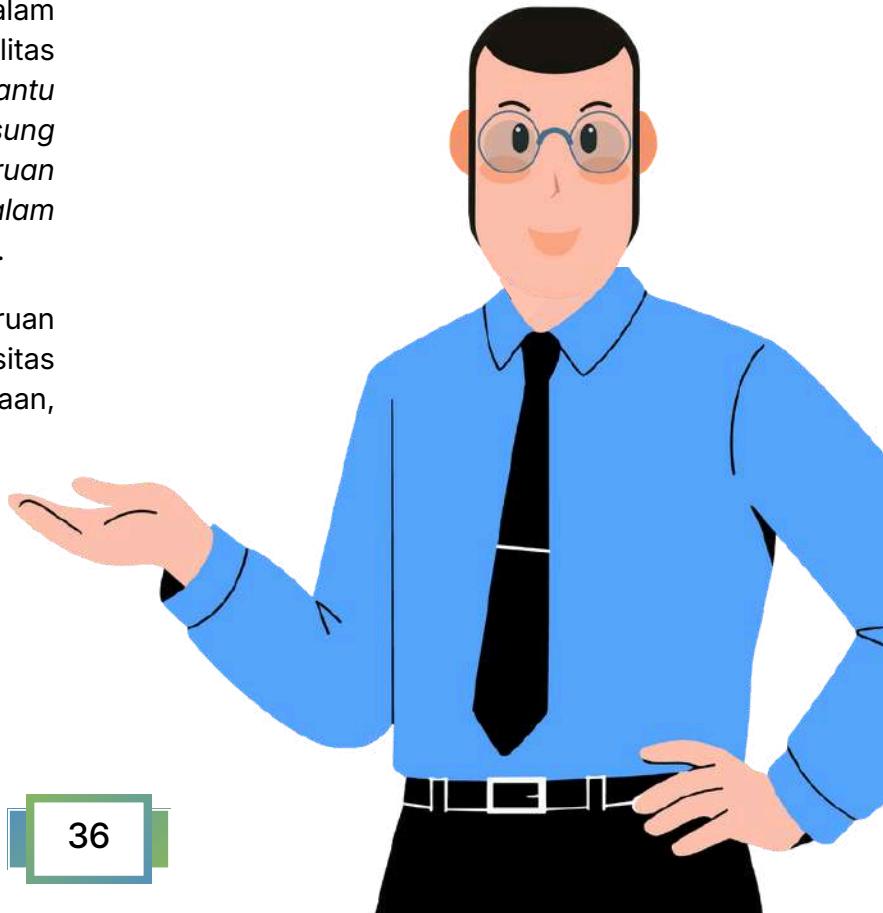


## Peran Strategis Apa Yang Dapat Diambil Perguruan Tinggi Dalam Riset, Pendampingan, dan Pengembangan Kapasitas Untuk Mendukung KDKMP Syariah?

Perguruan tinggi berperan strategis melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi: penelitian, pengabdian, dan pendidikan. KDKMP Syariah menjadi laboratorium nyata bagi dosen dan peneliti, memungkinkan pengembangan model koperasi syariah berbasis bukti. Hasil penelitian, pengabdian masyarakat, serta keterlibatan mahasiswa dapat menjadi bahan ajar yang relevan, sehingga kasus yang disampaikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan realitas lapangan. *"Saya pikir ini sangat membantu KDKMP untuk memahami secara langsung bagaimana prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diterjemahkan ke dalam praktik manajerial yang nyata," tutur Ida.*

Dalam pengabdian masyarakat, perguruan tinggi membantu pendampingan kapasitas pengurus dari sisi manajerial, kelembagaan, dan penguatan ekosistem bisnis.

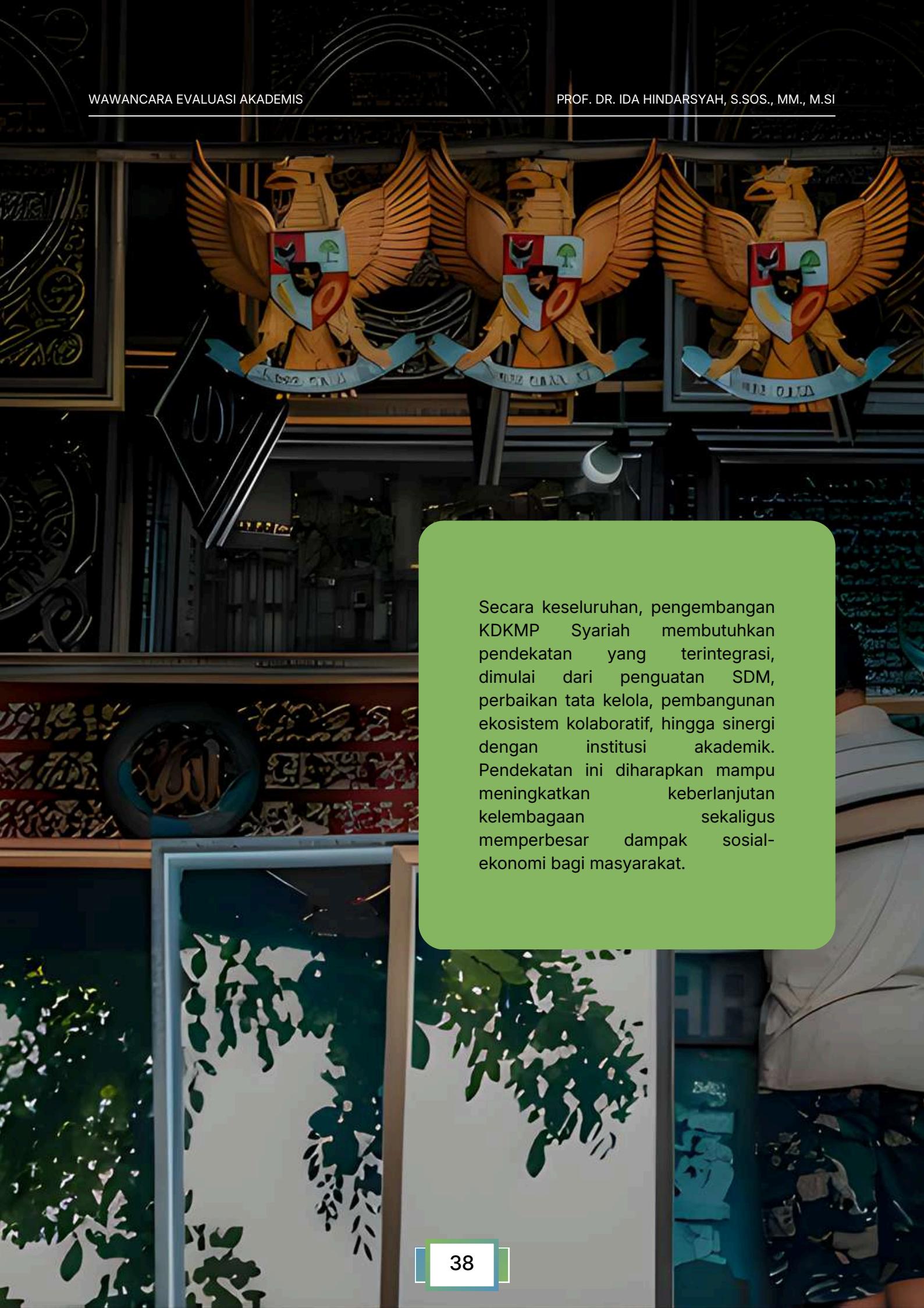
Program MBKM memberikan kesempatan mahasiswa belajar langsung di lapangan, menghubungkan teori dengan praktik nyata, sekaligus memperkuat branding dan promosi KDKMP Syariah. Keterlibatan akademisi dan mahasiswa mendukung keberlanjutan KDKMP dan menghasilkan bahan pembelajaran serta penelitian yang relevan.





## Rekomendasi Akademis Apa Yang Perlu Diprioritaskan Agar KDKMP Syariah Dapat Terus Berkembang?

- 1.** **Pertama**, aspek yang paling mendasar adalah penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan bahwa kualitas SDM menjadi fondasi utama sebelum pembenahan aspek lainnya dilakukan. "*Yang pertama itu penguatan SDM dulu, Bu. Penguatan SDM, baru yang kedua adalah bagaimana tata kelolaannya*" ujarnya.  
Penguatan SDM ini mencakup peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan KDKMP Syariah berjalan sesuai nilai dan tujuan yang diharapkan.
- 2.** **Kedua**, adalah pembenahan tata kelola kelembagaan. Tata kelola yang profesional dan transparan dinilai krusial, terutama mengingat tantangan pengelolaan KDKMP Syariah di masa pandemi. Ida menegaskan bahwa tata kelola yang baik harus mampu menjawab dinamika dan keterbatasan yang muncul dalam situasi krisis. "*Yang harus diperbuat itu adalah bagaimana tata kelolaannya. Tata kelola yang profesional, dan jika dikaitkan dengan syariah, tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut*" tuturnya.
- 3.** **Ketiga**, rekomendasi penting lainnya adalah pembangunan ekosistem dan penguatan kolaborasi. Berdasarkan pengalaman dalam *forum high level meeting*, ia mengamati adanya kebutuhan yang sangat besar dari para pelaku KDKMP untuk menjalin kerja sama, baik dengan KDKMP lain maupun dengan mitra eksternal. Kolaborasi tersebut terutama dibutuhkan dalam hal perluasan akses pasar.  
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah lini bisnis, namun para pelaku KDKMP masih memandang penting adanya kerja sama lintas daerah dan lintas desa agar potensi yang ada dapat dikembangkan secara optimal.
- 4.** **Keempat**, informan juga merekomendasikan kerja sama strategis dengan perguruan tinggi. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat basis akademik, inovasi model bisnis, serta pengukuran dampak sosial. "*Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kebetulan saya juga sedang membuat model bisnis yang berbasis SDGs dan bisa meningkatkan dampak yang besar bagi masyarakat, dengan KPI-KPI yang akan dirumuskan*" jelasnya.



Secara keseluruhan, pengembangan KDKMP Syariah membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, dimulai dari penguatan SDM, perbaikan tata kelola, pembangunan ekosistem kolaboratif, hingga sinergi dengan institusi akademik. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan kelembagaan sekaligus memperbesar dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.



# INSIGHTFUL

Data per 20 Januari 2026

## STATISTIK GERAI KOPERASI AKTIF



Gerai Kantor  
Koperasi  
**26243**

Gerai Sembako  
(Embrio Kop Hub)  
**3782**



Usaha Lainnya  
(KBLI 2020)  
**2912**

Agen Laku  
Pandai  
**2450**



Gerai Unit Usaha  
Simpan Pinjam  
(Embrio Kop Bank)  
**1122**

Agen Pos  
Indonesia  
**988**



Pangkalan LPG  
**976**

Kios Pupuk  
**574**



Logistik  
(Distribusi)  
**446**

Gerai Cold Storage/  
Cold Chain  
**381**



Apotek  
Desa  
**331**

Gerai Klinik  
Desa  
**266**



# PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI KDKMP



KDKMP Giri Mukti di Lebak, Banten, menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama dalam seluruh kegiatan koperasi, baik dalam layanan keuangan maupun pengelolaan kelembagaan. Penerapan prinsip ini mencakup larangan riba, pembagian risiko dan keuntungan secara adil, serta transparansi dalam setiap transaksi. Dengan menegakkan prinsip syariah, KDKMP Giri Mukti membangun kepercayaan anggota dan masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan usaha berbasis nilai keadilan dan keberkahan.

Bapak Alwin sebagai pendamping KDPKM Giri Mukti, Lebak memberikan pengalamannya dalam penerapan syariah dalam KDPKM. Perlu diketahui bahwa 100 persen atau sekitar 1200 orang Keluarga di wilayah Giri Mukti adalah Muslim,

penerapan syariah dalam KDKMP menjadi hal yang sangat memungkinkan untuk diaplikasikan. *"pertama kita Islam 100 persen. Yang kedua, kita bisa melakukan pelayanan ZISWAF di Koperasi Syariah kita."* ujarnya.

Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa KDKMP itu boleh berpola syariah, pemerintah membuka opsi untuk pelaksanaan KDPKM secara konvensional ataupun syariah. Hal tersebut yang menyebabkan masih terbatasnya KDPKM syariah yang ada, contohnya saja di Kabupaten Lebak itu hampir 100% beroperasi secara konvensional.

Berbeda dengan KDPKM Giri Mukti yang sudah berkomitmen menjalankan koperasi secara syariah. Prosesnya memang tidak mudah, namun juga bukan hal yang rumit justru jadi potensi untuk bisa lebih memberikan keuntungan dan pemerataan secara ekonomi masyarakat. *"Kita harus sepakat dengan pengurus, pengawas bahwa pola kita syariah walaupun saat ini secara legal masih konven."* ujarnya.



*Alwin Fajrie Siregar, SE*

KDKMP GIRI MUKTI, LEBAK, BANTEN



## Manfaat Dari Adanya KDPKM Giri Mukti

Secara geografis KDKMP Girimukti ini lokasinya memang jauh dari ibukota sekitar 4-5 jam, secara akses desa Giri Mukti sulit untuk dilalui, masih banyak jalan yang belum beraspal. Salah satu gerai yang ada adalah Gerai Sembako yang dibuat seperti minimarket modern namun dengan harga yang lebih murah bahkan dari harga pasar. "Jadi disini punya harga yang harga sangat murah, contohnya saat itu harga telur naik Rp 35.000 / kg. KDPKM Giri Mukti dapat menjual di harga Rp27.000. kenapa kita bisa Rp27.000? Karena kita memang langsung dari grosir, jadi rantai distribusi bisa lebih efisien" Ujarnya.

Selanjutnya di wilayah Giri Mukti memiliki potensi aren yang hanya ada di tiga negara, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Menurut Alwi kualitas Aren terbaik Khusus di wilayah Indonesia itu ada di Lebak. "Saat ini kita sudah produksi per bulan itu diangka 200 sampai 250 ton per bulan. Nah, ini lagi kita bangun lagi pabriknya. Mudah-mudahan bisa mencapai 750 ton per bulan karena permintaan pasar yang harus kita penuhi." Ujarnya.

Kemudian manfaat ketiga dengan hadirnya KDKMP Giri Mukti yang awalnya di sana tidak ada sinyal, sekarang sudah dibangunkan BTS oleh Telkom. Hal ini sebagai infrastruktur untuk menjadikan KDKMP Giri Mukti sebagai percontohan nasional dengan pendekatan digitalisasi yang modern.

Selanjutnya KDKMP Giri Mukti juga merancang untuk memaksimalkan potensi pengolahan produk daerah, khususnya aren dan juga Pisang. "Aren itu kan ada kolam kaling, selama ini kolang kalingnya hanya saat Ramadan. Bagaimana kolam kalim ini bisa dibuat menjadi produk turunan bisa untuk masker, kecantikan dan macam-macam lainnya. Yang kedua, disini banyak pisang yang masih dijual murah ke Ibukota. Sehingga nanti akan dilatih ibu-ibu desa untuk membuat turunan dari pisang." Ujarnya.



## Tantangan KDKMP Giri Mukti

Kapasitas SDM desa menjadi tantangan dari berkembangnya KDKMP, termasuk Giri Mukti. Hal ini membuat KDKMP sulit untuk mencari pengurus dan pengawas yang siap, terlebih harus juga memiliki spirit dan pemahaman tentang koperasi syari'ah. Kemudian tantangan lainnya adalah dari sisi permodalan. "Kita tentunya berharap permodalan yang cukup dapat menggerakkan ekonomi melalui KDKMP. Sebelumnya kami memanfaatkan dana-dana lokal, dana mitra yang sudah hampir 1 miliar kita digulirkan untuk beberapa sektor. Dalam waktu dekat juga akan masuk bantuan permodalan dari pemerintah, kami sangat mengharapkan itu untuk akelerasi KDKMP Giri Mukti" Ujarnya

Selain bantuan permodalan, kebutuhan utama dari KDKMP juga adalah peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengawas. Khususnya untuk KDKMP Giri Mukti yang berprinsip menjalankan operasionalnya secara syariah, menjadi penting untuk diberikan pelatihan secara khusus oleh pihak yang kompeten. KNEKS memiliki concern untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada KDKMP syariah.

***"Alhamdulillah bulan November kami sudah mendapatkan sosialisasi tentang koperasi syariah oleh KNEKS di Rangkasbitung. Ini menjadi pelatihan yang penting berkaitan dengan pemahaman SDM tentang bagaimana koperasi syariah beroperasi secara optimal"***

Ujarnya



### Rencana Masa Depan Pengembangan KDKMP Giri Mukti

Sebagai KDKMP Percontohan Nasional, KDKMP Giri Mukti aktif untuk juga membantu KDKMP yang lain dalam bentuk kolaborasi projek bersama dengan pemerintah seperti dalam projek MBG (Makan Bergizi Gratis). "saat ini kami sudah dapat izin distribusi produk susu dari Bandung. Kami berkolaborasi dengan KDKMP lain untuk menyebarkan ke SPPG yang ada di Lebak yang menjadi kebutuhan utama semua dapur MBG." Ujarnya

Berdasarkan kondisi tersebut tentunya sangat dibutuhkan permodalan dan kemitraan yang kuat. Walaupun menjadi percontohan, namun KDKMP Giri Mukti ingin menjadi yang paling menonjol sendiri, namun ingin berbagi dengan sistem syariah yang digunakan terbukti bisa menjadi teladan dengan performa koperasi yang baik. Melalui penerapan prinsip syariah yang konsisten, KDKMP Giri Mukti diharapkan dapat menjadi model penguatan ekonomi syariah nasional sekaligus harapan baru bagi pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.





# INSIGHTFUL

Data per 20 Januari 2026

## RINGKASAN PEMETAAN LAHAN PER KORWIL

### Korwil 1

Total Aset: 2,420  
Total Desa/ Kelurahan: 6,500  
**37,23%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 3

Total Aset: 2,643  
Total Desa/ Kelurahan: 6,529  
**40,48%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 3

Total Aset: 4,328  
Total Desa/ Kelurahan: 6,225  
**69,53%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 4

Total Aset: 3,449  
Total Desa/ Kelurahan: 6,303  
**54,72%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 5

Total Aset: 4,364  
Total Desa/ Kelurahan: 6,224  
**70,12%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 6

Total Aset: 6,825  
Total Desa/ Kelurahan: 8,563  
**70,70%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 7

Total Aset: 7,261  
Total Desa/ Kelurahan: 8,494  
**85,48%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 8

Total Aset: 4,146  
Total Desa/ Kelurahan: 6,598  
**68,84%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 9

Total Aset: 3,716  
Total Desa/ Kelurahan: 7,486  
**49,64%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 10

Total Aset: 4,267  
Total Desa/ Kelurahan: 8,667  
**49,23%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 11

Total Aset: 2,656  
Total Desa/ Kelurahan: 5,464  
**48,61%** Kontribusi Wilayah

### Korwil 12

Total Aset: 1,233  
Total Desa/ Kelurahan: 6,709  
**18,38%** Kontribusi Wilayah

# IMPLEMENTASI PILOTING



## Bagaimana Peran BMT Amanah Sultra dalam Mendukung Pengembangan dan Penguatan KDKMP Syariah di Kota Kendari?

Peran BMT Amanah Sultra dalam mendukung pengembangan dan penguatan KDKMP Syariah di Kota Kendari dijalankan secara tidak langsung, melainkan melalui lembaga pendamping yang memiliki legitimasi hukum yang sesuai. Ketua SBBS BMT Amanah, Amal, menjelaskan bahwa pendampingan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Syariah dilakukan oleh APEX Islamic Microfinance (IMF), bukan oleh BMT Amanah Sultra secara kelembagaan. "Pendampingan Koperasi Merah Putih itu bukan dilakukan oleh BMT Amanah secara langsung, melainkan oleh APEX IMF Islamic Microfinance yang memang kami bentuk untuk tujuan pendampingan tersebut" ujarnya.

Hal tersebut dilakukan karena KDKMP Syariah berstatus sebagai koperasi primer berbadan hukum, sehingga secara regulasi tidak dimungkinkan untuk didampingi langsung oleh BMT. Oleh karena itu, pembentukan APEX IMF menjadi solusi strategis agar pendampingan dapat dilakukan secara legal dan terstruktur.

**"Kami membentuk APEX IMF agar pendampingan terhadap KDKMP Syariah tetap berjalan dan secara hukum terpenuhi"** jelasnya.

Dalam pelaksanaan pendampingan, APEX IMF menerapkan beberapa tahapan strategis. "Kami mulai pendampingan dari penguatan kegiatan, integrasi sistem berbasis teknologi, hingga standarisasi operasional dan kepatuhan syariah" ujar Amal. Pendampingan tersebut meliputi penguatan perencanaan kegiatan, integrasi antar-sistem berbasis teknologi, standardisasi operasional, serta pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

*Amaluddin M.,ST*

BMT AMANAH SULTRA KENDARI



Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu bentuk dukungan konkret yang telah direalisasikan adalah penerapan sistem digitalisasi koperasi syariah. Melalui APEX IMF, KDKMP Syariah didorong untuk mengadopsi sistem digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

Selain digitalisasi, APEX IMF juga memberikan standarisasi operasional syariah guna memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standarisasi ini berfungsi sebagai pedoman operasional agar praktik koperasi tetap konsisten dan patuh terhadap ketentuan syariah.

Aspek lain yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan bahwa sebagian besar pengelola KDKMP Syariah merupakan SDM baru yang masih memiliki keterbatasan pengalaman dalam pengelolaan koperasi.

"SDM di Koperasi Merah Putih rata-rata masih baru dan masih fresh, sehingga peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak" tegasnya.

Oleh karena itu, APEX IMF secara aktif menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, serta monitoring berkala untuk meningkatkan kompetensi pengelola koperasi dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan kelembagaan.

***"Kami fokus meningkatkan kapasitas SDM agar pelatihan, monitoring, dan pengawasan pertumbuhan koperasi dapat berjalan lebih efektif"*** tambahnya.

Peran BMT Amanah Sultra melalui APEX IMF berkontribusi signifikan dalam penguatan kelembagaan KDKMP Syariah di Kota Kendari, khususnya dalam aspek legalitas pendampingan, digitalisasi sistem, standarisasi operasional syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.





## Kontribusi Apa Yang Paling Nyata dalam Proses Digitalisasi KDKMP Syariah, Khususnya Pada Sistem Operasional dan Layanan Anggota?

Kontribusi utama dalam proses digitalisasi KDKMP Syariah diwujudkan melalui pendampingan penerapan sistem digital operasional koperasi yang mampu mendukung layanan anggota secara menyeluruh. Pendampingan ini diarahkan pada penguatan sistem di luar fungsi pelaporan administratif, sehingga koperasi memiliki perangkat operasional yang siap digunakan dalam aktivitas keuangan harian. *"Kami memfokuskan pendampingan pada sistem digital yang benar-benar bisa menjalankan layanan operasional koperasi"* ujar Amal.

Sebelumnya, KDKMP Syariah telah memanfaatkan SIMKOPDES (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) atau microsite sebagai sistem informasi dan pelaporan. Namun, keterbatasan fungsi operasional mendorong perlunya sistem pendukung tambahan. *"SIMKOPDES tetap penting, tetapi koperasi membutuhkan sistem lain agar operasionalnya berjalan secara utuh"* tuturnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperkenalkan SISPRO, sebuah sistem digital yang terhubung dalam ekosistem pengawasan dan dirancang untuk memperkuat layanan inti koperasi.

Amal menyampaikan, melalui SISPRO (Sistem Informasi Sistem Proses Operasional), koperasi memperoleh dukungan digital dalam pengelolaan keanggotaan dan simpanan secara terstruktur. Sistem ini memungkinkan pendaftaran anggota serta pengelolaan simpanan pokok, wajib, dan sukarela dilakukan secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi.

Selain aspek administratif, Amal menambahkan bahwa SISPRO juga memperluas kapasitas layanan transaksi keuangan. Koperasi kini mampu melayani pembayaran digital melalui QRIS dan dompet elektronik, serta mendukung pemindahan saldo antar rekening anggota. Integrasi layanan gerai link turut memungkinkan koperasi memberikan akses transaksi yang lebih luas kepada anggota.

Dengan demikian, implementasi SISPRO menandai pergeseran KDKMP Syariah dari koperasi berbasis administrasi menuju lembaga keuangan komunitas yang berorientasi layanan. Digitalisasi ini meningkatkan kesiapan operasional, memperluas akses layanan anggota, dan memperkuat daya saing koperasi syariah di tengah perkembangan ekosistem keuangan digital, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.



## **Bagaimana BMT Amanah Sultra Mendukung Pengembangan Unit Usaha Seperti Gerai Sembako dan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah?**

BMT Amanah Sultra memainkan peran strategis dalam pengembangan unit usaha KDKMP Syariah, khususnya gerai sembako dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Pendekatan yang diterapkan bersifat pendampingan intensif, mencakup aspek operasional, pembiayaan, dan integrasi sistem digital. Ia mengungkapkan

***"Kami mendampingi agar unit usaha seperti gerai sembako dan pembiayaan mikro bisa berjalan sesuai prinsip syariah."***

Ia menjelaskan bahwa dalam pengembangan gerai sembako, BMT Amanah membantu pengelolaan stok, pengaturan rantai pasok, dan integrasi transaksi digital, sehingga operasi gerai lebih efisien dan transparan. *"Kami menyiapkan sistem agar transaksi gerai lebih efisien dan transparan bagi anggota"* tambahnya. Hal ini memungkinkan anggota koperasi untuk memperoleh akses produk lokal dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi komunitas.

Lebih lanjut, ia menambahkan, untuk pembiayaan mikro, dukungan meliputi penyediaan modal awal, pendampingan dalam manajemen risiko, dan pelatihan literasi keuangan berbasis syariah. BMT Amanah juga memfasilitasi integrasi pembiayaan mikro dengan sistem digital koperasi, sehingga proses pencairan, pembayaran, dan pelaporan dapat berjalan secara lebih cepat dan akuntabel.

Dengan demikian, peran BMT Amanah Sultra tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membangun kapasitas operasional dan sistemik bagi unit usaha KDKMP Syariah. Pendekatan ini memastikan gerai sembako dan pembiayaan mikro tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi komunitas dan penguatan koperasi berbasis syariah.





## Tantangan Utama Apa Yang Dihadapi Dalam Proses Pendampingan KDKMP Syariah Berbasis Komunitas?

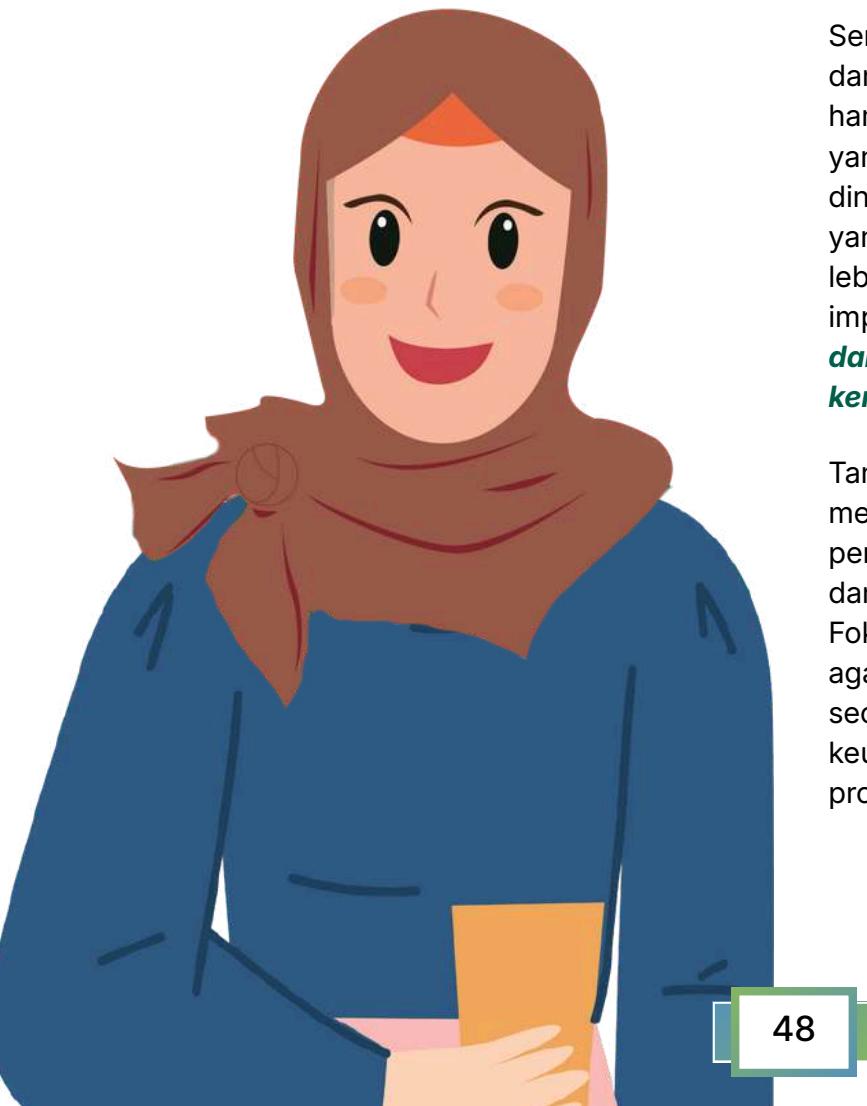
Pendampingan KDKMP Syariah berbasis komunitas menghadapi tantangan terutama yang bersumber dari kapasitas internal kelembagaan, bukan dari aspek regulasi. Amal mengungkapkan, berdasarkan pengalaman APEX *Islamic Microfinance*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan permodalan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas pengembangan layanan mikro syariah. “*Tantangan utama yang kami hadapi ada pada SDM dan permodalan,*” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa “*Pengelola KDKMP sebagian besar masih baru dalam tahap pengelolaan koperasi.*” Dari sisi SDM, mayoritas pengelola KDKMP Syariah merupakan pelaku baru dalam ekosistem koperasi dan keuangan mikro syariah. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kemampuan manajerial, pemahaman operasional, serta kecepatan adaptasi terhadap standar kelembagaan dan sistem layanan.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa keterbatasan permodalan turut membatasi ruang ekspansi koperasi, baik dalam pengembangan produk, perluasan layanan, maupun adopsi teknologi pendukung. Meskipun demikian, aspek digitalisasi menunjukkan kemajuan seiring dengan proses pendampingan yang berjalan secara bertahap.

Sementara itu, Amal menilai aspek regulasi dan perizinan tidak dipandang sebagai hambatan signifikan. Kerangka kebijakan yang bersifat *top-down* dari pemerintah dinilai telah memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga fokus tantangan lebih terletak pada penguatan kapasitas implementasi di tingkat koperasi. “**Regulasi dan perizinan relatif tidak menjadi kendala**” ujarnya.

Tantangan pendampingan KDKMP Syariah menuntut pendekatan yang menekankan penguatan SDM, konsolidasi permodalan, dan peningkatan kesiapan operasional. Fokus pada aspek internal ini menjadi kunci agar KDKMP Syariah dapat berkembang secara berkelanjutan sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang profesional dan berdaya saing.





## **Sejauh Mana Model Kolaborasi Antara Institusi Keuangan Mikro Syariah dan KDKMP Syariah Dinilai Efektif?**

Kolaborasi antara Institusi Keuangan Mikro Syariah, melalui APEX IMF, dan KDKMP Syariah terbukti efektif dalam membangun kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan operasional koperasi pemula. Model ini bersifat pendampingan, di mana lembaga keuangan yang lebih mapan berperan sebagai penguat kapasitas dan fasilitator ekosistem bagi koperasi baru.

***"Kami menyiapkan SDM dan sistem digital agar ekosistem operasionalnya langsung terbentuk"*** ujar Amal.

Pendekatan kolaborasi diawali dengan penguatan SDM melalui pelatihan manajerial dan operasional, sekaligus penyediaan sistem digitalisasi operasional. Integrasi ini memungkinkan koperasi untuk beroperasi dalam ekosistem yang terstruktur sejak awal, mengurangi risiko kegagalan operasional yang umum terjadi pada koperasi baru.

Di sisi pembiayaan, ia menyampaikan bahwa APEX dan BMT menyediakan modal awal berbasis bagi hasil, sehingga koperasi dapat segera memulai operasional sambil menunggu penyaluran bantuan pemerintah. Mekanisme ini tetap sesuai dengan prinsip syariah dan membangun budaya tata kelola yang sehat.



Amal menuturkan *"Dengan sistem yang saling terhubung, isu likuiditas dapat diatasi melalui kerja sama antar koperasi."*

Amal juga menilai, efektivitas kolaborasi semakin terlihat melalui ekosistem operasional yang saling terhubung antar koperasi, serta dengan memanfaatkan sistem digital dan jaringan gerai bersama. Koperasi yang kekurangan likuiditas dapat memanfaatkan jaringan ini untuk transaksi lintas koperasi dan akses ke gerai mitra, sehingga layanan anggota tetap berjalan tanpa gangguan.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan kelancaran operasional dan penguatan kapasitas anggota, tetapi juga membentuk ekosistem berkelanjutan yang saling mendukung, mengurangi kerentanan koperasi pemula, dan memperkuat daya saing KDKMP Syariah. *"Ekosistem ini wajib dijaga agar tetap sesuai prinsip syariah dan berkelanjutan"* tambahnya.

Sinergi antara institusi keuangan mikro syariah dan koperasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat keberlanjutan, kapasitas SDM, dan integrasi operasional KDKMP Syariah di era digital.



## **Dukungan Apa Saja Yang Masih Dibutuhkan Untuk Mengoptimalkan Peran Institusi Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengembangan KDKMP Syariah?**

Untuk mengoptimalkan peran IKMS dalam pengembangan KDKMP Syariah, dukungan yang diperlukan harus bersifat strategis dan menyeluruh, terutama dalam aspek jangkauan, digitalisasi, dan permodalan. *"Dukungan yang paling utama adalah memperluas jangkauan karena saat ini mereka masih sebatas lokal"* ujarnya.

Menurutnya, perluasan jangkauan mencakup akses ke pasar yang lebih luas, baik melalui jaringan antar-koperasi maupun kolaborasi dengan mitra eksternal. Langkah ini akan memungkinkan LKM Syariah meningkatkan keterlibatan anggota dan memperluas dampak ekonomi komunitas.

***"Transaksi digital sangat penting untuk efisiensi operasional dan menambah sumber pendapatan non-personal"* tegasnya.**

Ia menambahkan, bahwa saat ini digitalisasi layanan menjadi kebutuhan mendesak bagi KDKMP Syariah. Implementasi sistem digital tidak hanya menurunkan biaya operasional, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan melalui layanan keuangan digital, seperti QRIS, e-wallet, dan transaksi lintas koperasi.

***"Penguatan permodalan harus terus didukung agar koperasi bisa berkembang secara berkelanjutan"***

tambahnya. Penguatan permodalan menjadi faktor kritis untuk mendukung ekspansi layanan dan kapasitas operasional. Dukungan modal yang memadai akan memungkinkan IKMS memberikan pembiayaan lebih luas kepada anggota, mengurangi risiko likuiditas, dan memastikan keberlanjutan kegiatan koperasi.

Dukungan terhadap IKMS perlu diarahkan pada ekspansi jangkauan, digitalisasi operasional, dan penguatan modal, sehingga lembaga ini mampu memainkan peran strategis dalam pengembangan KDKMP Syariah, meningkatkan akses layanan keuangan berbasis syariah, dan membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan.

## Bagaimana Potensi Replikasi Model Kolaborasi Ini Di Wilayah Lain?

Amal menyampaikan bahwa "Kegiatan di Kendari menjadi contoh bagi beberapa KDKMP lain, bahkan Kemenkop datang untuk mendokumentasikan proses digitalisasi dan operasionalnya." Model kolaborasi antara IKMS dan KDKMP Syariah di Kota Kendari dinilai menunjukkan efektivitas operasional dan digitalisasi yang dapat dijadikan contoh untuk wilayah lain. Implementasi di Kendari berfungsi sebagai piloting project, yang mempermudah pemahaman mekanisme kerja sama, digitalisasi layanan, dan penguatan SDM bagi koperasi pemula.

Ia menyampaikan bahwa model kolaborasi yang digunakan KDKMP Syariah di Kota Kendari dapat dijadikan contoh karena mekanisme yang dibangun bersifat adaptif dan *skalabel*. Melalui dukungan pelatihan SDM, sistem digitalisasi, dan modal awal, koperasi di wilayah baru dapat mengadopsi model yang telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan layanan anggota.

**"Jika Kendari sudah berhasil, model ini sangat memungkinkan untuk diduplikasi di kabupaten lain"** tambahnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan replikasi bergantung pada adaptasi kontekstual sesuai kondisi lokal. Peniruan mekanisme secara literal tanpa inovasi dapat mengurangi efektivitas dan keberlanjutan operasional. Oleh karena itu, inovasi lokal menjadi bagian penting dari strategi replikasi agar koperasi tetap relevan dengan kebutuhan komunitas setempat.

"Replikasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan" tegasnya.

Dengan demikian, pengalaman di Kendari menegaskan bahwa model kolaborasi IKMS dan KDKMP Syariah tidak hanya dapat direplikasi, tetapi juga memberikan panduan bagi pengembangan koperasi berbasis komunitas di berbagai wilayah Indonesia, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan operasional.

## Rekomendasi Apa Yang Dapat Diberikan Untuk Memperkuat Sinergi Antara Institusi Keuangan Mikro Syariah dan KDKMP Syariah Kedepannya?

Menurutnya, penguatan sinergi antara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah dan KDKMP Syariah memerlukan pendekatan multidimensi, meliputi regulasi, digitalisasi, pendanaan, manajemen risiko, pendampingan, dan inovasi produk.

**"Rekomendasi utama adalah memperkuat regulasi, termasuk sertifikasi pengurus dan infrastruktur warung digital"** tutur Amal.

Lebih lanjut, ia menambahkan, regulasi yang kuat menjadi fondasi agar seluruh mekanisme operasional dan kolaborasi berjalan konsisten. Sertifikasi pengurus dan penguatan warung digital memastikan koperasi mampu memenuhi standar profesional dan operasional berbasis syariah.



ia juga menegaskan bahwa dukungan pendanaan menjadi elemen penting. Seperti APEX menyediakan APEX Fund sebagai sumber ekosistem yang memudahkan *pooling fund*, sehingga operasi koperasi tidak terganggu oleh keterbatasan modal.

Selain itu, pengelolaan risiko perlu dibahas secara sistematis, termasuk risiko dari pendampingan yang tidak intensif atau kapasitas internal koperasi yang masih terbatas.

***“Pendampingan intensif sangat penting, termasuk monitoring dan pelatihan berkelanjutan”*** ujarnya.

Pendampingan secara intensif memperkuat kapasitas SDM, meminimalkan kesalahan operasional, dan memastikan adopsi digitalisasi berjalan efektif.

Inovasi produk turut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing koperasi. *“Produk harus inovatif dan berasal dari produksi lokal, bukan sekadar menyalin yang sudah ada di pasaran,”* tuturnya. Produk lokal yang dihasilkan oleh anggota KDKMP harus dikembangkan dan dipasarkan secara mandiri, bukan hanya meniru produk yang sudah ada di pasar.

Sinergi yang berkelanjutan menuntut regulasi yang kokoh, pendanaan stabil, manajemen risiko terstruktur, pendampingan intensif, dan inovasi produk. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas operasional, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekosistem KDKMP Syariah di tingkat komunitas.



# INSIGHTFUL

Data per 20 Januari 2026

## PERMOHOKAN KEMITRAAN DESA / KELURAHAN





## KDKMP SYARIAH SEBAGAI PENGUAT INKLUSIVITAS EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Hafieda Rasyifa - Digital Funding Amil Corporate BSI Maslahat

### Lahirnya KDKMP Syariah

KDMP Syariah atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lahir untuk memperkuat fungsi koordinasi, konsolidasi, dan akselerasi program ekonomi syariah berbasis masyarakat. Diposisikan sebagai instrumen alternatif yang mampu memperluas partisipasi ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan secara SDGs. Menjadi jawaban atas ketimpangan akses ekonomi yang menjangkau kelompok akar rumput.

Indonesia memiliki **84.291 desa/kelurahan** (BPS, 2025), namun akses ke lembaga keuangan formal masih rendah di wilayah terpencil. Dari 131.617 ribu koperasi nasional, sekitar 3.964 yang berbasis syariah (Kemenkop, 2024). KDKMP Syariah hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan layanan keuangan halal yang mudah diakses, berbasis komunitas, dan selaras dengan budaya lokal.

Kehadirannya juga diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan praktik kelembagaan yang profesional, mendorong ekonomi yang inklusif, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dilansir dari [mediakeuangan.kemenkeu.go.id](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id) atas arahan Presiden Republik Indonesia, menegaskan bahwa KDKMP sebagai bentuk keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan memihak rakyat. Presiden Prabowo meluncurkan secara nasional program Koperasi Desa Merah Putih yang melibatkan lebih dari 80.000 KDMP di seluruh Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden pada Juli 2025.

Implementasi KDMP/KKMP di seluruh daerah merupakan salah satu langkah konkret dalam mengatasi kendala distribusi pangan, menghadapi praktik-praktik yang merugikan petani dan masyarakat, sekaligus menjadi langkah besar penguatan ekonomi dari hulu ke hilir.



## Peran Strategis KDKMP Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Holistik

Meningkatkan perekonomian secara holistik dari hulu ke hilir yaitu dari desa ke kota. Sehingga, tidak hanya terpusat di satu pulau saja atau bahkan satu sektor saja.

Melalui tujuh gerai wajib sebagai fondasi awal usaha KDKMP/KKMP diharapkan dapat menjaga nilai ekonomi dari hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bahkah menjadi salah satu penunjang hilirisasi sektor pertanian.

Ketujuh gerai tersebut meliputi gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, gerai *cold storage/cold chain*, dan gerai logistik untuk kelancaran distribusi barang. Gerai-gerai tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal desa atau kelurahan masing-masing.

Pada kelembagaan ini, terdapat unit usaha yang beragam mulai dari simpan pinjam syariah, perdagangan kebutuhan pokok, hingga pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan UMKM lokal yang berpotensi hingga pasar ekspor. Selain struktur internal, KDKMP juga mendapat dukungan eksternal dari pemerintah desa sebagai fasilitator, LPDB KUMKM sebagai penyedia pembiayaan bergulir, serta pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM.

*Khusus di Aceh, penguatan kelembagaan KDKMP Syariah juga melibatkan KNEKS dan KDEKS untuk memastikan ekosistem syariah berjalan sesuai regulasi daerah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, seluruh transaksi koperasi dijalankan tanpa riba, gharar, maupun maisir, menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Kelembagaan yang terstruktur ini menjadikan KDKMP bukan hanya wadah ekonomi desa, tetapi juga model koperasi modern berbasis syariah yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia.*



## Komitmen KDKMP Syariah Terhadap Nilai Inklusivitas

KDKMP Syariah berkontribusi signifikan dalam mendorong inklusivitas ekonomi melalui perluasan akses masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Kehadirannya membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal, khususnya pelaku usaha mikro, masyarakat prasejahtera, dan komunitas berbasis lokal, agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Melalui integrasi dana sosial syariah dengan program pemberdayaan ekonomi, KDKMP Syariah mendorong transformasi pendekatan dari bantuan konsumtif menuju penguatan kemandirian. Dana ZISWAF dikelola secara produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga manfaatnya dirasakan secara lebih luas dan jangka panjang.

Selain itu, penguatan ekonomi berbasis komunitas dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah dengan memanfaatkan potensi local. KDKMP Syariah juga memperkuat kelembagaan di tingkat daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi serta memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Di sisi tata kelola, penerapan prinsip syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan amanah memperkuat kepercayaan publik serta memperluas keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, KDKMP Syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga pilar pembangunan inklusif yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## Tantangan dan Penguatan KDKMP Sebagai Lembaga yang Kredibel

Namun demikian, efektivitas KDKMP Syariah dalam mendorong inklusivitas sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaannya. Tantangan terkait standardisasi manajemen, akuntabilitas, integrasi digital, serta pengukuran dampak sosial-ekonomi perlu menjadi perhatian serius. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, peran KDKMP Syariah berisiko tereduksi menjadi program administratif, bukan sebagai institusi transformasional.



Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah yang murah, mudah, dan berorientasi produktif masih menjadi kendala. KDKMP dituntut mampu menjembatani dana sosial syariah dengan pembiayaan usaha masyarakat secara aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Sesuai dengan standarisasi tata kelola, kejelasan peran antar unit, serta integrasi prinsip *good governance* dan *sharia compliance* menjadi tugas utama dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mitra strategis.

Adanya fragmentasi ekosistem ekonomi syariah seperti ZISWAF, koperasi, UMKM, dan pembiayaan syariah masih berjalan sendiri-sendiri. Harapannya dapat menjadi sebuah hub yang mampu mengonsolidasikan berbagai sektor tersebut agar tercipta rantai nilai ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdampak luas.

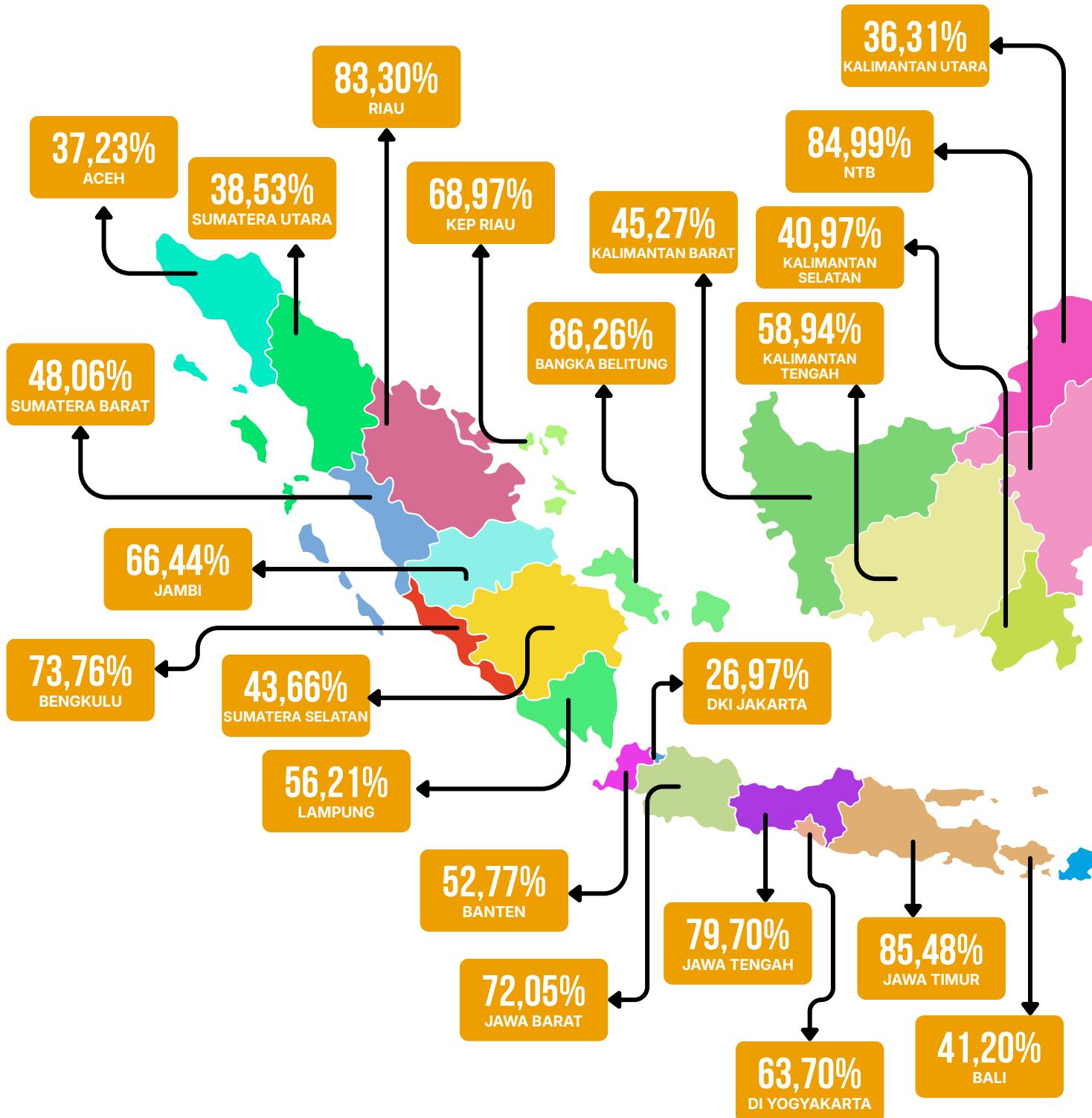
Maka, perlu menghadirkan SDM yang mumpuni dengan tingkat kemampuan literasi ekonomi syariah yang baik. Guna membentuk ekosistem dan meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat desa. Sebab, perbedaan kapasitas dan prioritas di tingkat daerah ini juga sering kali menghambat implementasi program.

## Arah Diferensiasi Lembaga

Masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap keberadaan ataupun peran dari kelembagaan ekonomi syariah yang mana salah satunya termasuk KDKMP Syariah. Sehingga, perlu menjadi perhatian untuk menguatkan visibilitas dan kejelasan peran lembaga dimata publik. Sebagai lembaga yang akan menjadi enabler ekonomi syariah masyarakat yang tentunya dapat diandalkan serta mudah dijangkau. Maka dari itu, diferensiasi yang kuat menjadi penting agar entitas ini mudah dikenali masyarakat sekaligus efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi syariah. Peran KDKMP dapat terus diperkuat juga melalui penyesuaian pendekatan agar semakin selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

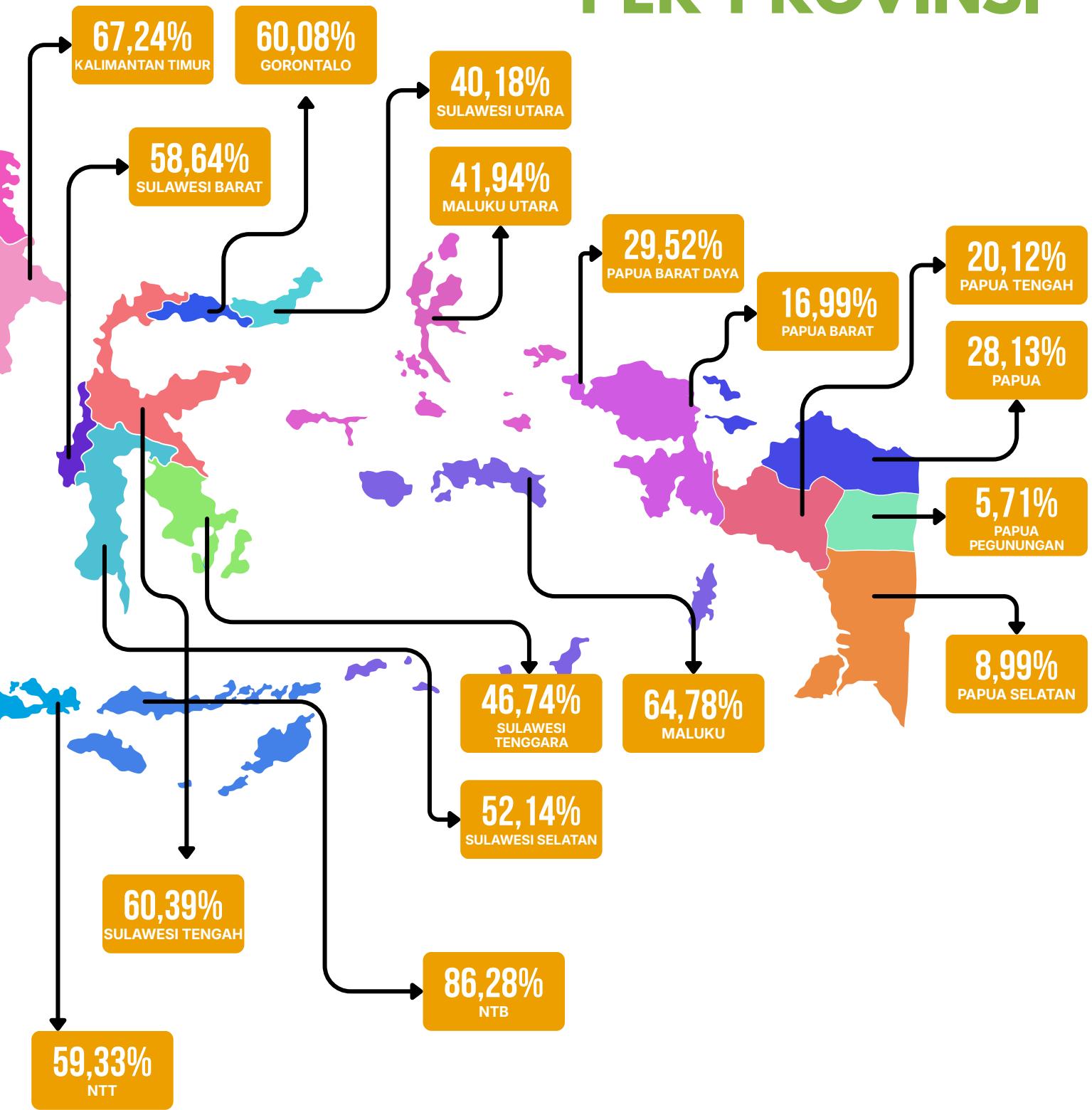
Dengan kejelasan peran dan fungsi tersebut akan menciptakan maslahat dalam pemerataan program. Selain itu dapat meminimalisir adanya potensi tumpang tindih atas program yang sama dengan lembaga lainnya. Disisi lain justru seharusnya KDKMP berpeluang dapat memperluas sinergi dengan stakeholder lokal lain. Seperti BUMDes, Koperasi dan UPZ/LAZ yang juga selaras dalam konteks pengembangan rantai nilai halal, implementasi prinsip-prinsip syariah, serta pemanfaatan instrumen ZISWAF secara produktif. Adapun *Unique Selling Point* yang dimiliki oleh KDKMP Syariah terletak pada perannya sebagai penghubung dan penguat ekosistem ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengintegrasikan koperasi dan usaha kolektif ke dalam rantai nilai sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Harapannya dengan kehadiran KDKMP Syariah ini dapat membawa harapan baru bagi terwujudnya ekonomi syariah yang lebih inklusif. Dengan tujuan untuk menjangkau kelompok rentan, memperkuat ekonomi berbasis komunitas, dan mendorong pemerataan wilayah. Membawa kebermanfaatan yang lebih luas yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sekaligus memperkuat posisi ekonomi syariah dalam arsitektur pembangunan nasional.



INSIGHTFUL

# PERSENTASE PEMETAAN LAHAN PER-PROVINSI

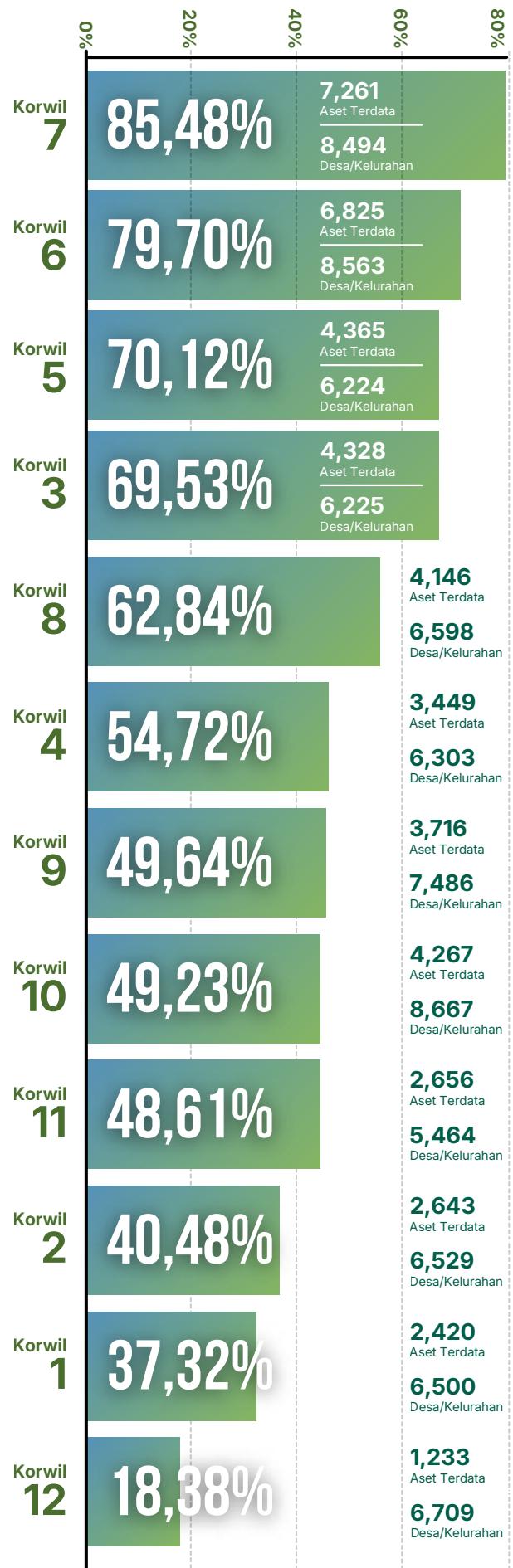




## INSIGHTFUL

# PERSENTASE PEMETAAN LAHAN PER KORWIL

Data per 20 Januari 2026





# DASHBOARD FASE I

## KOPERASI DESA/ KELURAHAN

## MERAH PUTIH

Status Data: 20 Januari 2026



Kelurahan Berbadan Hukum

**8.603**

Per 20/01/2026



Data Berbadan Hukum

**74.597**

Per 20/01/2026



Total  
Berbadan  
Hukum

**83201**

Per 20/01/2026

